



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III_2025

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 16 Oktober 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi

Daftar ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Eksekutif	1
I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Sumberdaya Manusia	8
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	11
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	13
2.1 Visi Presiden	14
2.2 Misi Presiden	14
2.3 Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	15
2.4 Penetapan Kinerja	18
2.5 Pengukuran Kinerja	26
III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	28
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	28
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	30
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	30
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	32
3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	47
3.2.4. Sasaran kegiatan IV, Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik	52
3.3. Akuntabilitas Keuangan	85
3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran	88

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran	88
IV. Penutup	90
4.1. Simpulan	90
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi	90
4.3. Langkah Perbaikan	91
V. Lampiran	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2025	6
Gambar 2.	Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan III tahun 2025	26
Gambar 3.	Calon induk Ikan Kakap Putih	34
Gambar 4.	Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan di Kab. Kep. Sula	38
Gambar 5.	Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon	42
Gambar 6.	Distribusi Bantuan Rumput Laut	51
Gambar 7.	Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	58
Gambar 8.	Tangkapan layar capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon TW III di aplikasi MonevPA kemenkeu	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025	8
Grafik 2.	Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2025	8
Grafik 3.	Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2025	9
Grafik 4.	Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut Triwulan III	33
Grafik 5.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut Triwulan III	37
Grafik 6.	Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut Triwulan III	41
Grafik 7.	Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut Triwulan III	45
Grafik 8.	Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut Triwulan III	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	15
Tabel 2.	Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2025	17
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025	28
Tabel 4.	Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	30
Tabel 5.	Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	32
Tabel 6.	Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan III	33
Tabel 7.	Capaian IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	36
Tabel 8.	Capaian IKU Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	39
Tabel 9.	Capaian IKU Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	43
Tabel 10.	Capaian IKU Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	46
Tabel 11.	Capaian IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	48
Tabel 12.	Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	50
Tabel 13.	Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	53
Tabel 14.	Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	55
Tabel 15.	Capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	60
Tabel 16.	Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	63
Tabel 17.	Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	65
Tabel 18.	Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	67
Tabel 19.	Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	69

Tabel 20.	Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	71
Tabel 21.	Deskripsi Tone Berita	73
Tabel 22.	Capaian IKU “Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen).....	74
Tabel 23.	Deskripsi Jenis Informasi Publik	75
Tabel 24.	Capaian IKU “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	78
Tabel 25.	Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	80
Tabel 26.	Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	82
Tabel 27.	Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	84
Tabel 28.	Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2025 dan 2024	85
Tabel 29.	Data realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan III tahun 2025	86

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dan Papua. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan Ketiga Tahun 2025 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2025, BPBL Ambon menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 24.830.270.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-032.04.2.567720/2025 tanggal 02 Desember 2024. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir September tahun 2025 sebesar Rp. 12.106.356.244 (Dua Belas Milyar

Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 48,76% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2024 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan September tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
2. Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (ekor) tercapai 1.158 ekor di akhir triwulan ketiga;
3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (ekor) tercapai 213.500 ekor di akhir triwulan ketiga;
4. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (sampel) tercapai 528 sampel di akhir triwulan ketiga;
5. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (sampel) tercapai 17 sampel di akhir triwulan ketiga;
6. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (orang), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
7. Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
8. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (kg), tercapai 3.180 kg diakhir triwulan ketiga;
9. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
10. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
11. Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (persen), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (persen) tercapai 100% di akhir triwulan ketiga;

13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (indeks), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
17. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (persen) tercapai 100% pada akhir triwulan ketiga;
18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (nilai), perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.;
20. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (persen) perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun;
21. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (persen) perhitungan akan dilakukan pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada triwulan ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2025 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2025 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan visi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dghm RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I merupakan penguatan transformasi yang meliputi (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; (iii) Transformasi Tata Kelola; (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (vi) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana; dan (vii) Kestinambungan Pembangunan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, RKP Tahun 2025 berpedoman pada 8 Sasaran Pembangunan dan 5 Agenda Pembangunan. Selaras dengan RKP, pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlandaskan 5 arah kebijakan berbasis Ekonomi Biru yaitu Penambahan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dengan ditetapkan nya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun anggaran 2025 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

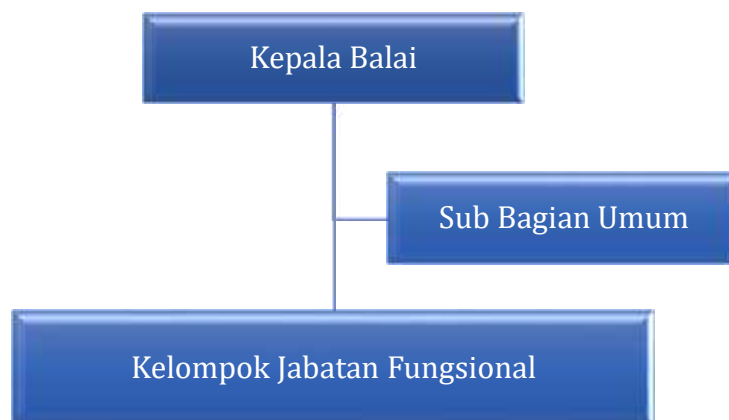
1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budi daya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budi daya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budi daya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budi daya laut;

6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budi daya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budi daya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budi daya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budi daya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2025

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, dan seluruh pegawai yang berjumlah 87 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Kerja

Tim Kelompok Kerja merupakan tim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai IKU yang satker. Tim kerja terdiri dari pejabat fungsional umum dan tertentu yang menjalankan kegiatan kerekeyasaan, pengujian, pendampingan, penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

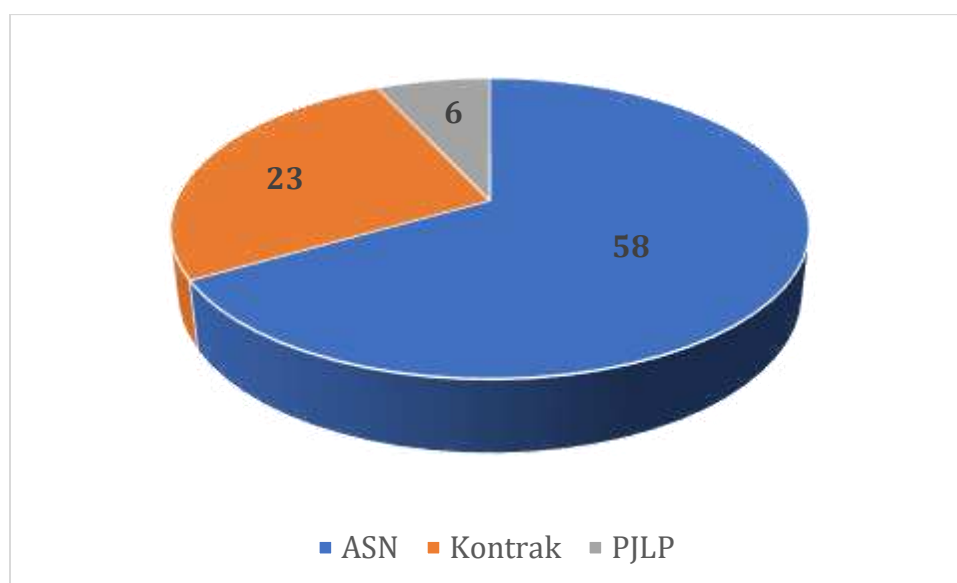
Pejabat fungsional tertentu di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari: Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur, Pengelola Kesehatan Ikan, Teknisi Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. 05/Kpts/BPBLA/OT.210/I/2022 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2022 terdiri dari 4 divisi yakni:

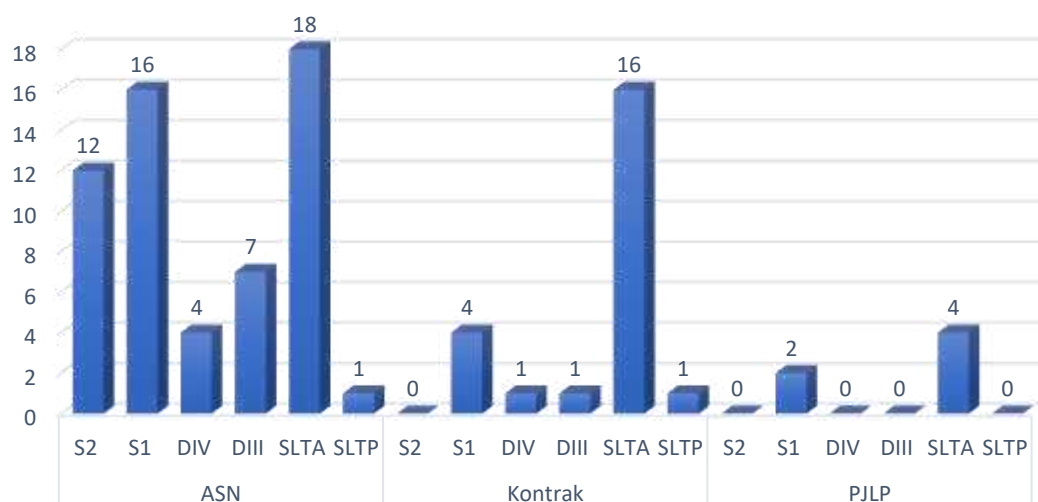
1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumput Laut
3. Divisi Produksi Benih Ikan Hias Laut dan Lobster
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium dan bibit Rumput Laut Kultur Jaringan

1.4. Sumberdaya Manusia

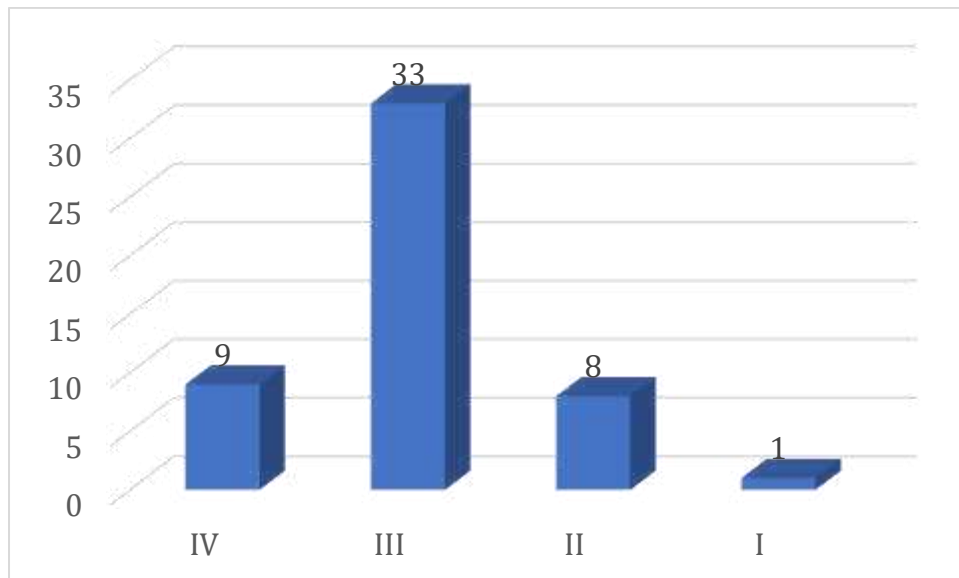
Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2025 terdiri dari 58 orang ASN (PNS dan PPPK), 23 orang tenaga kontrak dan 6 orang PJLP yang diuraikan sebagai berikut :



Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025



Grafik 2. Pendidikan Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2025



Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2025

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Secara umum Tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. KKP akan mendukung pengembangan budidaya tuna oleh investor di perairan Biak, Papua. Pengembangan budidaya dapat meningkatkan produksi tuna Indonesia yang saat ini sudah menyumbang 18 % dari produksi tuna global yang mencapai 8,27 juta ton. Dengan adanya tuna farming yang akan dilakukan oleh pelaku usaha maka akan mengurangi tekanan penangkapan tuna yang pada akhirnya akan menjaga kelestarian sumber daya tuna di masa mendatang.

Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukkan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangkan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi
5. Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan

Budidaya Laut Ambon pada tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2024 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

BAB II**PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.1. Visi Presiden

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Visi KKP adalah "Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"

2.2. Misi Presiden

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Asta Cita, antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya laut di lingkup wilayah kerjanya adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BPBL Ambon sejalan dengan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya. Penerapan dan pelaksanaan visi misi dilakukan secara bertanggungjawab didasari sikap gotong royong, yang saling mendukung memberi manfaat dan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi kepentingan stakeholder perikanan budidaya.

2.3. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2025 – 2029 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	• Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)
• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	• Produksi calon induk ikan air laut untuk operasional UPT BPBL Ambon (Ekor) • Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor) • Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel) • Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel) • sosialisasi/diseminasi/bimtek bidang perikanan budi daya Satker BPBL Ambon (Orang)

• Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	• Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit) • Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)
• Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	• Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai) • Indeks pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks) • Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen) • Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBL Ambon (Nilai) • Nilai pengawasan kearsipan internal BPBL Ambon (Nilai) • Persentase pelaku usaha terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen) • Persentase penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)

2.3.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 24.830.270.000 (Dua Puluh Empat Miliar Delapan

Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025:

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2025

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	3.363.744.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	14.432.846.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2025		24.830.270.000

2.4. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon di Awal Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2.	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142
		3.	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586
		4.	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309
		5.	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17
		6.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7.	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72
		8.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	9.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81
		11.	Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85
		13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92
		15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3
	17. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86
	18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70
	20. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80
	21. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

DATA ANGGARAN :

No.	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Laut	3.363.774.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	14.432.846.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025		24.830.270.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Revisi Perjanjian Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Juli 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana budi daya air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2.	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1142
		3.	Bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586
		4.	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309
		5.	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17
		6.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7.	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Ambon (Unit)	72
		8.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Ambon (Kg)	10.124
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	9.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81
		11.	Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	84
		13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BPBL Ambon (Nilai)	76
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92
		15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3
		17. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya satker BPBL Ambon (Persen)	≥86
		18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥80
		19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	70
		20. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80
		21. Persentase Penyelesaian SOP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)	65

Jakarta, 28 Juli 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manljo

DATA ANGGARAN :

No.	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Laut	3.363.774.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	4.668.680.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Tawar	2.365.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	14.432.846.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025		24.830.270.000

Jakarta, 28 Juli 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

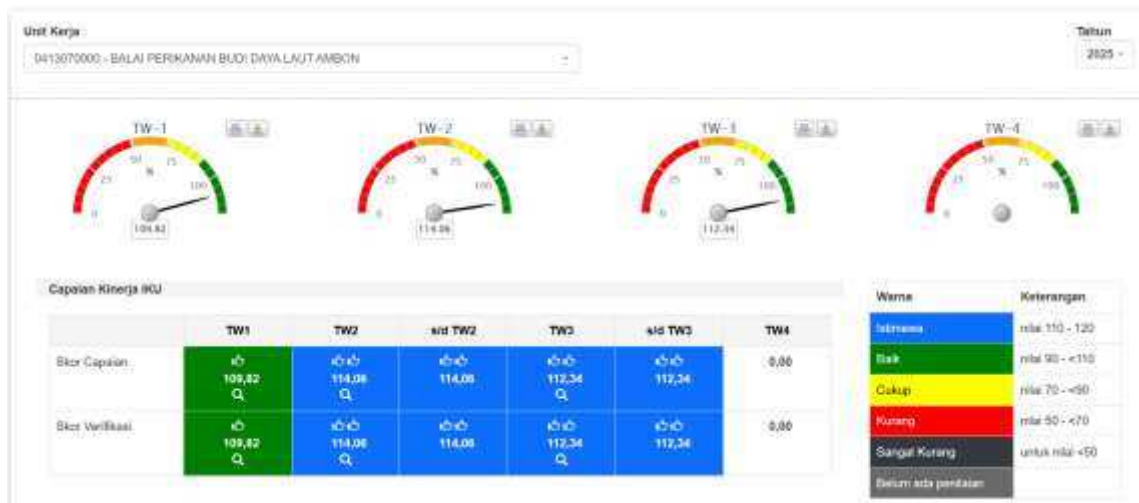
Manijo

2.5. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, BPBL Ambon menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.

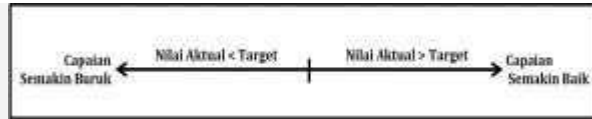
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata indikator kinerja utama dan IKM pada tahun 2025 di triwulan ketiga adalah sebesar 112,34 yang termasuk kategori Baik. Berikut adalah hasil tangkap layar capaian kinerja BPBL Ambon tahun Triwulan III tahun 2025.



Gambar 2. Capaian Kinerja IKU BPBL Ambon Triwulan III tahun 2025

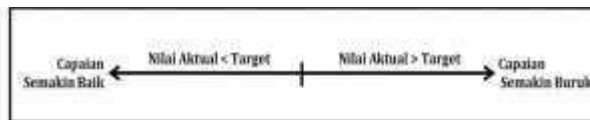
Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. **Maximize:** Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.



Contoh polarisasi data *maximize*.

2. **Minimize:** Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.



Contoh polarisasi data *minimize*.

3. **Stabilize:** Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.



Contoh polarisasi data *stabilize*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142 ekor	900 ekor	1.158 ekor	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW III
		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586 ekor	163.000 ekor	213.500 ekor	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW III
		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309 sampel	119 sampel	528 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW III
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel	11 sampel	17 sampel	Capaian IKU ini mencapai 120% pada TW III
		Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400 orang	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72 unit	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124 kg	3.179 kg	3.180 kg	Capaian IKU ini mencapai 100,03% pada TW III

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%	85%	100%	Capaian IKU ini 117,65% pada TW III
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86%	86%	100%	Capaian IKU ini mencapai 116,28% pada TW III
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun
		Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65%	-	-	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

IKU 1 : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha budidaya ikan air tawar memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar. Dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 266 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele Atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2025, pada tahun 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 11 unit yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Tabel 4. Capaian IKU Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar						
Nama Indikator : Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)			Target (unit)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	11	0

Capaian Kegiatan IKU

Capaian IKU ini di triwulan ketiga ini telah diserahkan 1 paket bantuan kepada penerima bantuan di Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur. Pada

triwulan ini telah dilakukan verifikasi beberapa kelompok penerima (CPCL) via online terhadap rekomendasi Anggota DPR RI yang telah masuk diantaranya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Halmahera Utara. CPCL dilakukan untuk melihat secara detil kesiapan atau kelengkapan dokumen kelompok penerima.

Perbandingan Kinerja

Capaian IKU ini di triwulan III bila dibandingkan dengan triwulan III Tahun 2024 memiliki capaian yang sama dimana realisasi triwulan III Tahun 2024 telah mencapai 0%. Capaian kinerja IKU ini dilakukan di akhir tahun. Adanya efisiensi anggaran dan penurunan target IKU ini merupakan salah satu rendahnya IKU ini di triwulan II Tahun 2025. Kondisi ini hampir sama dengan UPT laut lainnya.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Rendahnya nilai capaian dikarenakan ada rekomendasi Usulan Calon Penerima Calon Lokasi dari anggota dewan DPR RI yang dapilnya berada di wilayah kerja BPBL Ambon dan adanya efisiensi anggaran sehingga perlu adanya koordinasi untuk menghindari permasalahan dalam kegiatan ini. Kendala tersebut telah diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan proses CPCL secara online untuk menghemat anggaran dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Analisa Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 200.870.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 958.000.000 atau sebesar 20,97 %.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima bantuan pemerintah dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perhitungan capaian kegiatan dilaksanakan di akhir tahun dengan melihat jumlah sarana yang telah disalurkan ke masyarakat dengan memenuhi ketentuan petunjuk teknis yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN II : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT

IKU 2 : Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)

Produksi calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Produksi calon induk ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu bagi kegiatan budidaya ikan di BPBL Ambon.

Tabel 5. Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)			Target (ekor)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
900	1.158	120	120	100	1.142	101,40

Capaian Kegiatan IKU

Pada tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon juga ditargetkan memproduksi induk/calon induk unggul sebanyak 1.142 ekor. Sampai akhir triwulan ini 2025 capaian produksi calon induk terrealisasi 1.158 ekor atau sebesar 120% dari target triwulan III dan 101,40% dari target tahunan. Produksi calon Komoditas induk yang diproduksi oleh BPBL Ambon meliputi jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi induk unggul ikan konsumsi yaitu kakap putih dan bubara. Sedangkan produksi induk unggul ikan hias yaitu ikan hias *clownfish* dengan berbagai varian.

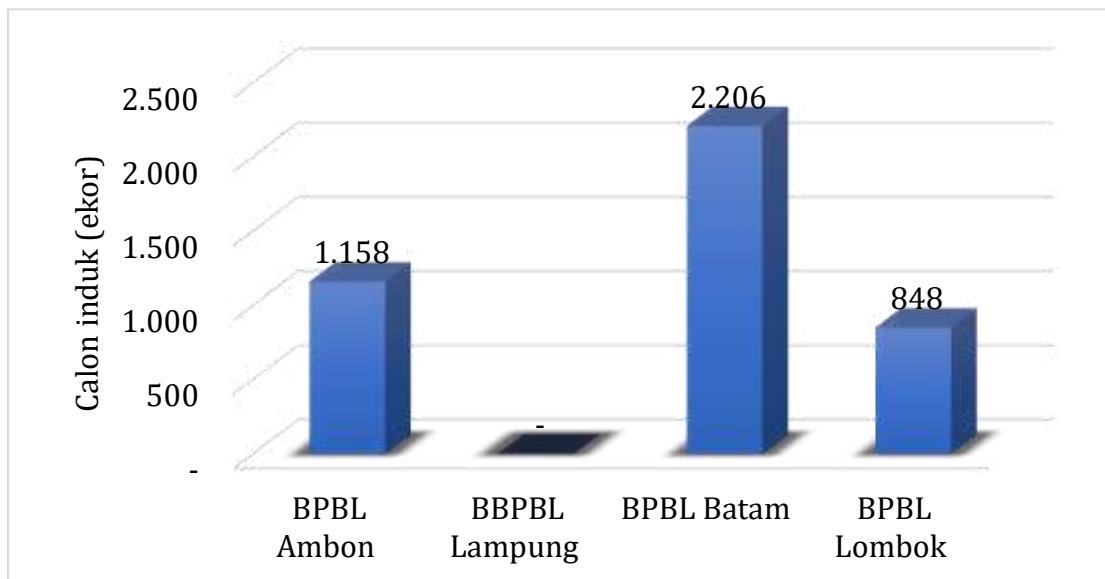
Analisa Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Juni 2025 terealisasi sebesar Rp. 305.968.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 305.968.000 atau sebesar 100 %.

Berikut adalah rincian produksi calon induk yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun pada triwulan ketiga 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Triwulan III

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	1.008 ekor
2.	Clownfish	150 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.



Grafik 4. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut Triwulan III

Perbandingan Kinerja

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2025 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada triwulan ketiga tahun 2025 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Batam dengan jumlah 2.206 Ekor. Sementara itu BPBL Ambon mampu memproduksi sebanyak 1.158 Ekor calon induk dan BPBL Lombok 848 ekor serta BBPBL Lampung belum ada produksi.

Capaian IKU ini di triwulan III juga dibandingkan dengan IKU yang sama di triwulan II Tahun 2024 dan hasilnya memiliki kesamaan yaitu tercapai 102% dari target triwulan. Keberhasilan ini diduga disebabkan oleh penerapan SOP kegiatan pemeliharaan calon induk dengan benar dan semakin baiknya manajemen pembesaran ikan yang dilakukan di keramba jaring apung baik terhadap ikan konsumsi maupun ikan hias laut.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Data capaian IKU ini di triwulan ini menunjukkan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calon yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan. Disamping itu terhadap ikan hias laut yang telah mencapai 50 varian mempunyai variasi atau peluang ketersediaan induk yang cukup variasi.



Gambar 3. Calon induk Ikan Kakap Putih

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi calon induk antara lain tetap melalui melaksanakan kegiatan pemeliharaan calon induk sesuai SOP dan melakukan perbaikan terhadap kendala yang ada di lapangan dengan tepat dan cepat.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Dalam meminimalisir potensi kematian massal pada calon induk yang diperlihara dapat ditempuh dengan menjalankan SOP pemeliharaan calon induk dengan baik dan benar.

IKU 3 : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)

Bantuan benih ikan laut adalah program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyediakan benih ikan berkualitas kepada pembudidaya ikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, kesejahteraan pembudidaya, dan ketahanan pangan.

Capaian Kegiatan IKU

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2025 sebesar 423.586 ekor. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat berupa jenis ikan konsumsi dan ikan hias laut. Secara rill progress capaian Bantuan Benih sampai dengan bulan September 2025 ini adalah sebesar 213.500 ekor dari perencanaan target triwulan yang telah ditetapkan sebesar 163.000 ekor. Bantuan Benih yang disalurkan pada triwulan ketiga terdiri atas benih ikan konsumsi yang terdiri benih ikan kakap putih dan ikan bubara sebanyak 210.500 ekor dan benih ikan hias sebanyak 3.000 ekor. Realisasi triwulan III berdasarkan target triwulan III adalah 120%, namun jika dibandingkan dengan target tahunan maka telah bantuan benih ikan laut tahun 2025 telah tercapai 50,40%.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Bantuan Benih Ikan Laut Rp. 1.329.391.000,-. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan

ketiga TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.140.271.704 atau sebesar 85,77% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Tabel 7. Capaian IKU Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)			Target (ekor)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
163.000	213.500	120	120	100	423.586	50,40

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Data Penerima Bantuan benih telah diproses penginputan dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KKP, Realisasi bantuan benih pada triwulan ini telah mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik, untuk beberapa komoditas unggulan seperti kakap putih, bubara dan ikan hias laut. Bantuan benih diberikan kepada pembudidaya yang ada di Propinsi Maluku yaitu di Kota Ambon. Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan di Propinsi Maluku Utara yaitu di Kabupaten Kepulauan Sula. Perbandingan capaian triwulan III Tahun 2025 dan triwulan III Tahun 2024 terjadi kesamaan dicapaian dimana realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara khusus Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menguasai teknologi budidaya kakap putih dan bubara (Kuwe) serat ikan hias clownfish yang mencapai 50 varian. Perbedaan tata kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis seperti kelengkapan administrasi usulan permohonan bantuan dari pokdakan, jarak lokasi balai dan lokasi calon penerima bantuan, dan akses transportasi atau biaya operasional pengangkutan.

Pada proses produksi benih ikan konsumsi, Selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih. Pada benih kakap putih dan bubara juga ditemukan infeksi *Trichodina*. *Trichodina* sp. merupakan ektoparasit pada ikan air tawar maupun ikan laut. Hampir semua spesies ikan dapat terserang *Trichodina* sp. (Durborow 2003). Inang yang paling sering terserang *Trichodina* sp. biasanya berasal dari famili Cyprinidae (Afifah et al.

2014). *Trichodina* sp. akan mudah menginfeksi ikan jika kepadatan penebaran tinggi dan tingkat pemberian pakan yang tinggi serta kualitas air yang rendah (Durborow 2003).

Tingginya kandungan bahan organik dalam kolam dapat menyebabkan tingginya jumlah patogen sehingga kulit akan mensekresi mucus yang berlebih sebagai antibodi untuk mendegradasi patogen. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga lebih mudah terinfeksi ektoparasit. Serangan *Trichodina* sp. dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan hiperplasia pada permukaan tubuh dan insang (Afifah et al. 2014). Serangan parasit ini menyebabkan hiperplasia yang dapat menyebabkan gangguan osmotik, pernapasan bahkan menyebabkan kematian. Kondisi ini mengakibatkan terhalangnya aliran air menuju filamen insang sehingga dapat menyebabkan ikan stres dan sulit untuk bernapas.



Grafik 5. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut Triwulan III

Perbandingan Kinerja

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan ketiga tahun 2025, secara umum 4 satker laut telah melakukan proses pencapaian IKU. Perbedaan nilai realisasi bantuan benih ikan laut hal ini tentunya disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap Balai memiliki

komoditas unggulan tertentu misalnya Lampung dengan cobia, Batam dengan bawal bintang, Lombok dengan kakap putih. Pencapaian tertinggi ada di BBPBL Lampung yang diikuti oleh BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui penerapan atau menjalankan SOP kegiatan dengan baik dan melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung di dalamnya. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budidaya. Selain itu pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga mutu media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Produksi benih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti serangan penyakit, maka rencana aksi dalam manajemen kesehatan ikan, khususnya penanganan infeksi parasit dapat dilakukan dengan perendaman ikan dengan menggunakan obat/bahan kimia sesuai dengan petunjuk tim kesehatan ikan internal satker. Selain itu dapat dilakukan penambahan suplemen dalam pakan yang diberikan sampai ikan terlihat sehat, suplemen seperti vitamin C secara umum dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit.



Gambar 4. Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan di Kab. Kep Sula

IKU 4 : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

Salah satu faktor penyebab gagalnya usaha budidaya ikan adalah terjadinya kejadian penyakit pada ikan budidaya, penyakit ikan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dengan mortalitas tinggi. Penyakit ikan adalah segala bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan ikan merasa terganggu kehidupannya. Atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, kimia, biologis, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal yang disebabkan factor internal atau eksternal.

Penyebab penyakit dapat berasal dari dalam tubuh ikan maupun luar. Faktor internal antara lain akibat keturunan (genetic), seksresi internal, imunodefisiensi, kelainan saraf atau gangguan metabolik. Sedangkan faktor eksternal antara lain: serangan pathogen, hama, lingkungan atau malnutrisi.

Capaian Kegiatan IKU

Sampai dengan akhir triwulan ketiga tahun 2025, capaian kinerja pada IKU pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon mencapai 528 sampel dari target triwulan ketiga sebesar 119 sampel. 528 sampel tersebut terdiri dari 211 sampel untuk pengujian kualitas air, 302 sampel untuk pengujian mikrobiologi dan 15 sampel untuk pengujian biomolekuler.

Tabel 8. Capaian IKU Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)			Target (sampel)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
119	528	120	120	100	309	170,87

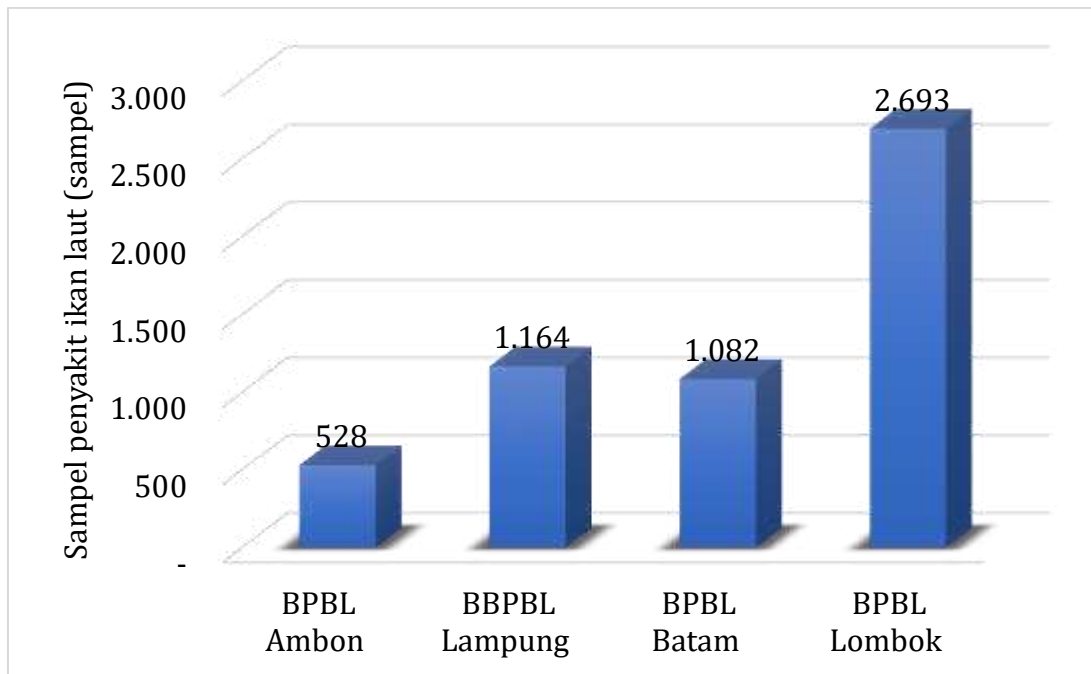
Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari jumlah sampel yang diuji, sampel ikan hias merupakan sampel dengan infestasi mikro-parasit tertinggi dibandingkan sampel benih ikan konsumsi. Infestasi parasite pada ikan hias nemo didominasi oleh *Pseudorhabdosynocus* sp. sedangkan pada ikan konsumsi didominasi oleh Necrosis Insang. Selain cacing *Pseudorhabdosynocus* sp., infestasi parasite pada ikan nemo juga ditemukan siliata *Amyloodinium*, *Uronema* dan *Cryptocaryon*. Organ yang terserang adalah insang, sehingga hasil pengamatan menunjukkan adanya abnormal pada struktur insang berupa hyperplasia, edema, nekrosis, kongesti, dan gas bubble. Kondisi abnormal pada struktur insang menyebabkan kesulitan dalam penyerapan oksigen dengan optimal.

Hasil pengujian mikro-bakteri pada sampel menunjukkan adanya infeksi vibriosis. Spesies *Vibrio* yang patogen mampu menimbulkan penyakit epizootic yang serius, namun beberapa spesies yang lain hanya bersifat patogen oportunistik yang menyebabkan penyakit apabila ikan mengalami luka fisik, luka akibat parasit, dan stress. Menyukai lokasi pesisir untuk berkembang karena pengaruh bahan organik yang melimpah di area pesisir. Semakin tinggi nilai TOM maka semakin tinggi kelimpahan bakteri *Vibrio* di perairan. Selain itu suhu perairan yang hangat juga memicu kelimpahan bakteri di perairan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kualitas air, dimana cukup tinggi yang berdampak pada kelimpahan bakteri $>10^5$ kol/ml.

Hasil uji virus pada sampel benih ikan konsumsi tidak ditemukan hasil positif. Hal ini diduga karena sampel ikan yang mengalami kematian memang tidak terinfeksi oleh *Iridovirus* maupun VNN.

Perbandingan Capaian IKU ini di TW III Tahun 2025 dan dibandingkan dengan TW II Tahun 2024 terjadi peningkatan layanan sampel. Salah satu factor yang diduga memicu penyebabnya adalah musim hujan yang intens di Bulan Juli sampai dengan Agustus 2025 yang menyebabkan penurunan kualitas air dan memudahkan serangan penyakit.



Grafik 6. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut Triwulan III

Perbandingan Kinerja

Walaupun layanan pengujian sampel BPBL Ambon TW III Tahun 2025 mengalami nilai yang sama bila dibandingkan dengan TW II Tahun 2024 yaitu melebihi target triwulanan, namun bila dibandingkan dengan jumlah layanan pengujian sampel pada UPT Laut lainnya merupakan yang terendah. Penyebab pembanding adalah jumlah pembudidaya, komoditas dan lahan budidaya yang beroperasi di wilayah kerja BPBL Ambon masih yang sedikit yang mengirimkan atau mengujikan sampel di laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Pengujian Sampel adalah Rp. 69.414.000 Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan ketiga TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 62.205.000 atau sebesar 89,61% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut

Upaya pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah tindakan

yang sebaiknya dilakukan pembudidaya untuk mengatasi serangan penyakit. Upaya kuratif atau pengobatan adalah upaya yang dilakukan pembudidaya untuk mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat baik yang bersifat alami maupun sintetis. Pengobatan diberikan berdasarkan jenis penyakit, pathogen dan dosis tertentu.

Sampel uji berupa sampel ikan dan sampel air baik internal maupun eksternal. Kondisi sampel ikan harus masih segar, baru mati, atau masih hidup dan belum busuk. Sampel uji internal diperoleh dari sampel ikan dari unit-unit produksi internal melalui pengambilan sampel aktif secara purposive (ditentukan) yaitu ikan yang diduga terkena infeksi pathogen. Sementara sampel eksternal diperoleh dari pihak luar yang memasukkan sampelnya untuk diuji.



Gambar 5. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel adalah melakukan pelayanan pengujian atau melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulangan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

IKU 5 : Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)

Isu Resistensi Antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) telah menjadi perhatian semua pihak baik di lingkup kesehatan manusia, lingkungan, perikanan maupun peternakan. Untuk merespon ancaman AMR tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPTnya mengimplemantasikan rencana aksi nasional yang telah disusun bersama kementerian kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa produk akuakultur khususnya komoditas ikan konsumsi telah memenuhi prinsip keamanan pangan sehingga menjamin kesehatan masyarakat.

Kegiatan surveilans dan pengujian Antibiotic Microbial Resistance (AMR) bertujuan untuk memantau jenis, jumlah, distribusi, tepat atau tidaknya antimikroba yang dipergunakan untuk penanganan penyakit ikan dalam perikanan budidaya. Selain itu memantau kejadian resistensi bakteri patogen pada ikan terhadap antimikroba tertentu. Data hasil surveilan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan terhadap penggunaan antibakteri pada bidang perikanan.

Capaian Kegiatan IKU

Lokasi surveilans AMR yang dilakukan BPBL Ambon sampai dengan triwulan ini berlokasi pada KJA kelompok pembudidaya di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barata dan di kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dengan sampel ikan dari jenis ikan kakap putih dan kuwe/bubara yang dipelihara oleh pembudidaya. Adapun capaian IKU TW ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 9. Capaian IKU Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)			Target (sampel)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
11	17	120	120	100	17	100

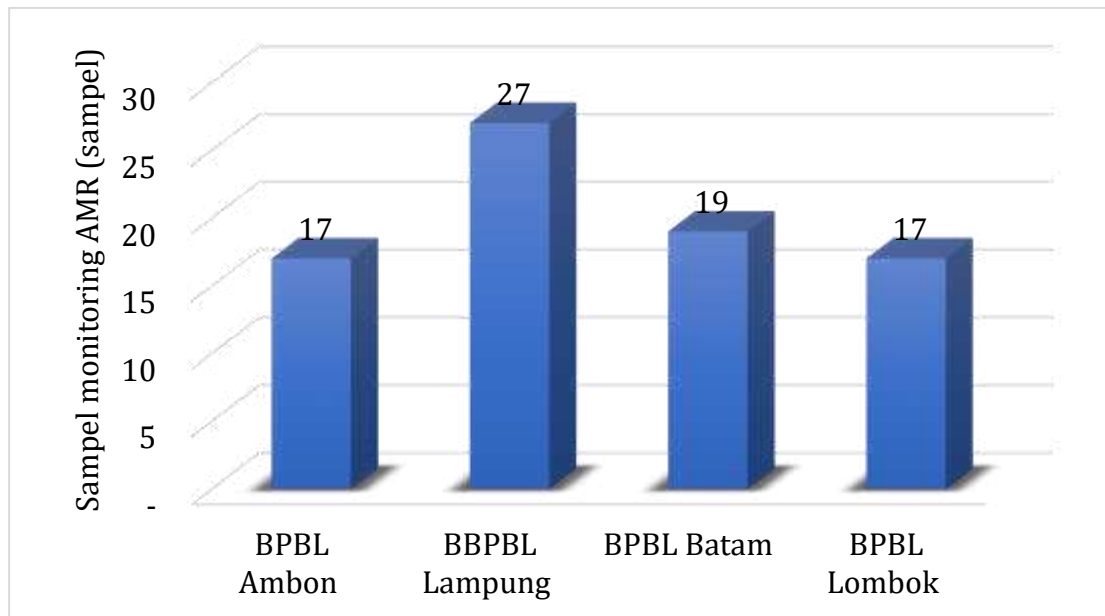
Hasil surveilans tahun 2025 dilaksanakan di wilayah Maluku khususnya Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupeten Maluku Tengah dengan

hasil Hasil isolasi bakteri tidak diperoleh isolate target *V. alginolyticus* pada semua sampel yang diperoleh. Penyempitan lokasi target berkaitan dengan penyesuaian anggaran pengambilan sampel AMR. Pengambilan sampel AMR akan dibagi per triwulan untuk TAD dan TAL. Penurunan target sampel di tahun 2025 menjadi 17 sampel dibanding tahun-tahun sebelumnya berdampak pada penurunan perolehan isolate positif *V. alginolyticus*.

Perbandingan Kinerja

Seperti halnya di tahun 2024, tidak ditemukan isolate positif *V. alginolyticus* pada sampel AMR yang lokasi di perairan tempat pengambilan sampel uji. Bakteri yang teridentifikasi dominan adalah jenis *V. parahaemolyticus*. Jenis ini adalah bakteri halofilik Gram-negatif yang ditemukan di lingkungan muara, laut, pesisir dan tambak. Jenis bakteri ini dapat bertahan pada perairan dengan salinitas yang cukup rendah. Di Triwulan III, Dengan tidak dilakukannya pengujian AST maka tidak diperoleh data sensitivitas antimikroba. Sehingga belum dapat disimpulkan tidak adanya penggunaan kedua bahan antimikroba tersebut pada proses budi daya ikan di tambak maupun KJA, meski data *Antimicrobial Use* (AMU) menyatakan tidak adanya penggunaan bahan antimikroba.

Hingga akhir triwulan ketiga tahun 2025, capaian kinerja pada IKU pengujian sampel AMR telah melebihi target triwulan yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel AMR yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon sudah mencapai 17 sampel yang melebihi dari target Triwulan III sebesar 11 sampel uji. Demikian bila dibandingkan dengan capaian TW III Tahun 2024 mengalami nilai yang sama. Dan persentase capaian UPT laut juga masih sama bila dibandingkan satker lain di triwulan yang sama.



Grafik 7. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut Triwulan III

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU ini adalah Rp. 15.538.000. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan ketiga TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau sebesar 96,54% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut

Mengidentifikasi lokasi-lokasi budidaya yang rentan terjadi serangan penyakit. Selanjutnya menjalankan kegiatan pengujian layanan kesehatan ikan dan lingkungan terkhusus sampel untuk sampel-sampel yang diduga mengalami AMR.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel AMR adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian, melakukan pengujian sampel lab sesuai dengan standar (Uji AST) dan melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

IKU 6 : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Secara sederhana di lingkup kerja masing-masing, dapat dipertanyakan manfaat teknologi pertanian yang proses perakitannya telah menelan banyak biaya. Besar kecilnya manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan diseminasi paket teknologi.

Capaian Kegiatan IKU

Capaian IKU ini sampai TW III Tahun 2025 masih kosong yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran kegiatan sehingga penjadwalan target yang ditetapkan pada TW IV, sehingga kegiatan sampai sekarang masih berkoordinasi dengan para tenaga ahli Anggota DPR RI.

Tabel 10. Capaian IKU “Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)”

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut						
Nama Indikator : Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)			Target (orang)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	110	0	400	0

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Koordinasi intensif dengan para tenaga ahli anggota DPR RI terkait pelaksanaan bimtek pembenihan ataupun budidaya ikan laut.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU AMR Rp. 160.000.000. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan Ketiga TA. 2025 belum ada realisasi Rp. 2.073.000 atau 1,30% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Suatu diseminasi teknologi perikanan budidaya dilakukan secara bertahap, maka jumlah teknologi yang didiseminasikan harus terbatas. Kalau jumlah teknologi terbatas, pembudidaya dapat memilih teknologi yang mampu

menggabungkan antara kesederhanaan dan risiko yang rendah dengan tambahan produksi yang cukup berarti. Dengan cara demikian akan dicapai tingkat keberhasilan kegiatan diseminasi yang tinggi dan secara otomatis akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.

SASARAN KEGIATAN III : TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT

IKU 7 : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Program bantuan sarana dan prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan menjadi salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program ini adalah IKU Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut. Target atas IKU ini adalah 72 paket bantuan kebun bibit rumput laut.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik dan hal ini menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana budidaya rumput laut yang memadai.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Capaian Kegiatan IKU

Capaian IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon di triwulan ketiga ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Capaian IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)			Target (unit)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	120	0	72	0

Capaian IKU ini sampai TW III Tahun 2025 masih kosong. IKU ini termasuk dalam kegiatan yang terdampak efisiensi anggaran sehingga kegiatan baru dalam tahap perencanaan. Upaya berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI masih dilakukan.

Perbandingan Kinerja

Bila dibandingkan dengan capaian IKU TW III Tahun 2024 mengalami penurunan dimana pada TW III Tahun 2024 sudah terealisasi 120 % dimana pembudidaya telah menerima bantuan sarana budi daya kebun bibit rumput laut.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Efisiensi anggaran terhadap bantuan pemerintah menyebabkan penjadwalan ulang target realisasi ke Triwulan IV tahun berjalan dan capaian akan dihitung secara tahunan.

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon adalah Rp. 1.081.300.000 Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan ketiga TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 117.567.327 atau sebesar 10,87% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah koordinasi dalam hal perencanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan untuk dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat dan mengambil upaya lebih lanjut terkait efisiensi anggaran.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Koordinasi tim dalam melakukan revidi perencanaan sehingga jika ada kegiatan sejenis dapat segera dilakukan dengan berdasarkan kondisi yang ada.

IKU 8 : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)

Rumput laut Kotoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperature tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginofit, yang terdiri dari jenis *Kappaphycus* sp, *Euchema* sp, *Chondrus* sp, *Hypnea* sp dan *Gigartina* sp. Dalam industry dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industri farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Capaian Kegiatan IKU

Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan. Pada musim tertentu kondisi perairan tidak cocok untuk pertumbuhan rumput laut sehingga semuanya mati atau tidak tumbuh secara optimal, sehingga pada musim tanam berikutnya menyebabkan ketersediaan bibit sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan penyediaan bibit secara berkesinambungan untuk peningkatan luas area budidaya belum dapat terpenuhi.

Penyediaan bibit unggul rumput laut telah dilakukan dengan cara seleksi rumpun yang memiliki laju pertumbuhan harian tinggi pada beberapa generasi penanaman. Bibit seleksi kemudian diperbanyak dengan metode stek kemudian disebar ke pembudidaya rumput laut.

Kultur jaringan merupakan Teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas serta menumbuhkan bagian bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik dalam wadah tertutup sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap.

Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan antara lain:

- Memiliki sifat identik dengan induknya
- Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas
- Mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar
- Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin
- Pada rumput laut, produksi bibit dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim.

Tabel 12. Capaian IKU Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)

Sasaran Kegiatan: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut						
Nama Indikator : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)			Target (kg)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
3.179	3.180	100,03	120	83,35	10.124	31,41

Analisa Penggunaan Anggaran

Pagu anggaran IKU Bantuan bibit rumput laut adalah Rp. 222.520.000. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada ketiga ketiga TA. 2025 terealisasi sebesar Rp. 194.126.000 atau sebesar 87,24% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan kegiatan bantuan Bibit Rumput Laut adalah tersalurkannya bantuan sebanyak 3.180 kg bibit r u m p u t laut dengan capaian 100,03% dari target

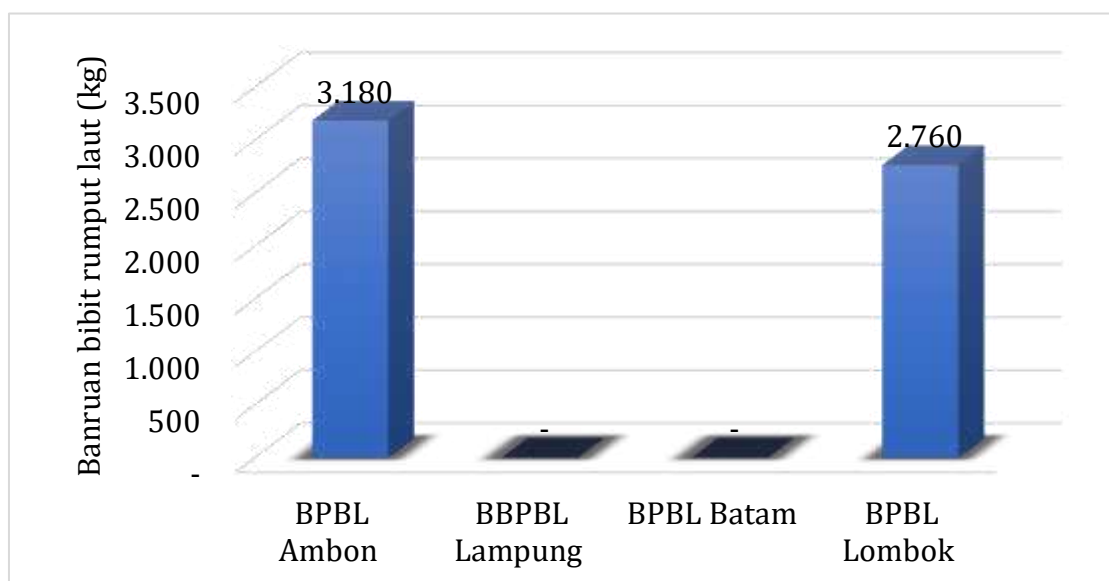
triwulan III. Kegiatan Bantuan Bibit Rumput Laut ini diharapkan dapat mendukung jaminan ketersediaan Bibit Rumput Laut pada kawasan budidaya rumput laut secara berkesinambungan khususnya di Provinsi Maluku, dan Maluku Utara.

Realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, bantuan bibit rumput laut mencapai 3.180 Kg dari target tahunan 10.124 Kg. Bantuan ini didistribusikan di Kota Tual, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu.



Gambar 6 . Distribusi Bantuan Bibit Rumput Laut

Perbandingan Kinerja



Grafik 8. Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut Triwulan III

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian kegiatan bantuan bibit rumput laut pada satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki capaian yang tinggi dibandingkan dengan satker yang lain. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu lokasi perairan memiliki karakteristik tersendiri dalam menunjang pertumbuhan rumput laut seperti tingkat pertumbuhan, respon kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi bibit rumput laut antara lain melalui penerapan SOP kegiatan dengan baik dan juga melakukan perbaikan metode pemeliharaan bibit terutama bibit yang baru dihasilkan dari laboratorium kultur jaringan dengan metode modifikasi untuk mengurangi potensi kerusakan/kematian bibit.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penanaman kembali dengan adanya bantuan bibit untuk meningkatkan produksi rumput laut, serta mengetahui dengan pasti terkait waktu masuknya musim tanam rumput laut.

SASARAN KEGIATAN IV : TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG BAIK

IKU 9 : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Capaian Kegiatan

Penilaian Mandiri SAKIP untuk unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah dilaksanakan di Semester I, untuk BPBL Ambon telah

memperoleh hasil 83,5 dan akan dicantumkan pada akhir tahun 2025. Capaian IKU nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IKU Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	84	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36% dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Upaya Peningkatan nilai PM SAKIP lingkup BPBL Ambon pada tahun 2025 dilakukan dengan mengisi dan mengupload dokumen SAKIP di Kinerjaku dan Google Drive SAKIP DJPB Dokumen SAKIP yang telah diinput mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulanan beserta bukti dukungnya
2. Rencana Aksi Triwulanan
3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan
4. Rincian Target IKU tahun 2025
5. Perjanjian Kinerja tahun 2025
6. Renja
7. Manual IKU
8. SKP pegawai

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan

instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 13 dapat diketahui bahwa capaian nilai PM SAKIP BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut dilakukan pengukuran di akhir tahun.

Rencana Tindak lanjut

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada triwulan berjalan, melakukan pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan saat dilakukan asistensi dan atau audit PM SAKIP oleh eselon I dan tim audit.

IKU 10 : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga

merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budi Daya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip the right man and the right place dapat terpenuhi. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/assessment dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMENSJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai Human Capital Development Plan (HCDP).

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Indeks Profesional ASN Unit Kerja BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)			Target (indeks)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	81	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

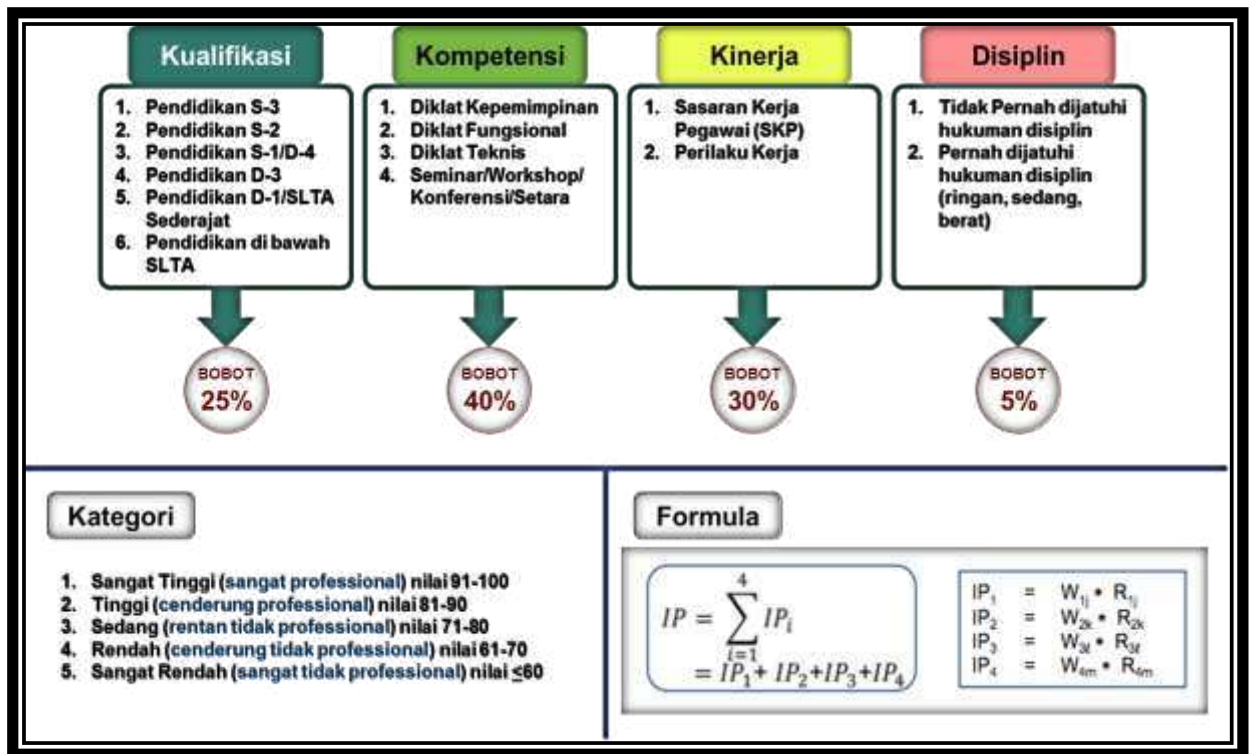
1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan

manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;

4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Bimbingan Teknis memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Seiring dengan jaman yang terus berkembang, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang diduduki dan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.



Gambar 7. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Dalam proses pencapaian target IKU IP ASN, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus, karena pada saat ini peningkatan IP ASN dapat dilakukan secara daring seperti Bimtek, Seminar maupun Workshop melalui zoom meeting. Perhitungan IKU IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 14 dapat diketahui bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, hal ini dikarenakan hasil perhitungan akan disampaikan di akhir semester kedua nanti.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai disesuaikan dengan tugas dan jabatannya secara online di internal KKP sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

IKU 11 : Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)

Menurut pasal 16 UU No. 15/2004, muatan yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan

keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian IKU Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	100	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap keuangan dan aset

negara/ barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi melakukan kegiatan terkait keuangan sesuai peraturan yang berlaku, pengadaan barang jasa sesuai peraturan yang berlaku, inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama dan satker lainnya disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah dengan berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menindaklanjuti segala temuan pemeriksaan dengan data dukung yang memadai.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 12 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit
- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin
- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi
- Penyebab hakiki, tunjukan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

Capaian Kegiatan

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
85	100	120	120	100	85	120

Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon pada triwulan ketiga sebesar 100% rekomendasi itjen telah terselesaikan rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh satker. Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan itjen yang tebit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2025 (Triwulan III Tahun 2025).

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon pada triwulan ini meliputi penyelesaian tindak lanjut atas temuan/sisa rekomendasi LHP Itjen KKP pada tahun 2024 yang telah diselesaikan tepat waktu dan diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK).

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 15 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 sama dibandingkan

dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama begitu juga dengan nilai capaian BPBL Ambon relatif sama dengan capaian satker lain pada triwulan ini .

Rencana Tindak lanjut

Pada Triwulan III, pada BPBL Ambon telah dilaksanakan Pemantauan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024-2025 pada BPBL Ambon. Dari kegiatan tersebut ada 3 temuan dengan jumlah 7 rekomendasi dan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 409,312. Dari upaya perbaikan diambil untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai batas waktu yang diberikan, kesemua temuan dan rekomendasi telah dinyatakan tuntas dan telah diterbitkan berita acara tindak lanjut terhadap temuan tersebut.

IKU 13 : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaannya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi

birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Capaian Kegiatan

Capaian Persentase Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 17. Capaian IKU Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	76	0

Pencapaian target ini telah dicapai pada tahun 2021, dimana BPBL Ambon telah mendapat predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai perolehan 83,14.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Pada tahun 2025 akan direncanakan dilakukan assessment penilaian ulang dari kegiatan zona integritas di BPBL Ambon. Progress kegiatan dalam mempertahankan predikat tersebut adalah:

- Pendokumentasian kegiatan perencanaan
- Pendokumentasian kegiatan akuntabilitas kinerja
- Pendokumentasian manajemen SDM
- Pendokumentasian sistem pengawasan
- Pendokumentasian kegiatan pelayanan publik

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 16 dapat diketahui bahwa IKU ini sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dapat diketahui bahwa capaian BPBL Ambon baik secara volume maupun prosentase belum dapat dibandingkan disebabkan Capaian IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

Rencana Tindak lanjut

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan penilaian WBK saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan pemenuhan dokumen pengungkit dan unsur persepsi masyarakat yang menjadi stakeholder Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan internalisasi terkait kegiatan WBK di lingkup BPBL Ambon dan melakukan review kebutuhan dan pemenuhan dokumen masing masing bidang secara berkala.

IKU 14 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Pagu Anggaran Belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.830.270.000.

Capaian Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 18. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	92	0

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (*pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM*); (ii) Mendukung manajemen kas (*pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D*); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (*penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja*).

Hasil capaian IKU ini di triwulan ketiga adalah 94,39. Capaian dapat dilihat pada data aplikasi OMSPAN

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran

100%

100%

100%

Indikator Pelaksanaan Anggaran

100%

100%

100%

NO	KODE WPP	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	SUMBER PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONTRIBUSI	SIMPULAN	REMARKS
						REVISI DIPA	DEKAS HALAMAN DEKAS	PENYERAPAN ANGGARAN	WILAYAH KONTRAKTUAL	REVISI/REVISI TAGIHAN	KONSELORAN UP DAN TUR	FAKSIAN OUTPUT					
1	001	002	007720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	94.39	100%	0.00	94.39	
					Revisi	10	10	10	10	10	10	10					
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					
					Nilai Akhir	94.39						94.39					

Gambar 8. Tangkapan layar capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon TW III di aplikasi MonevPA kemenkeu

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian IKU ini yang dinilai 94,39 telah melebihi target tahunan. Namun nilai tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKP DJPB hal ini dikarenakan realisasi anggaran selaras dengan rencana penarikan dana pada Hal III DIPA karena pada sebagian kegiatan terutama pada kegiatan bantuan pemerintah tidak berjalan sesuai jadwal. Hal ini terjadi pada kegiatan proses CPCL dan /atau menunggu rekomendasi usulan penerima bantuan dari mitra komisi IV DPR RI.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 17 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat semesteran..

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut dari pelaksanaan IKU ini adalah penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya

tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian *output* yang benar-benar optimal.

IKU 15 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi

- Capaian Keluaran. Pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Capaian Kegiatan

Capaian Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 19. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	71,5	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon meliputi: pengelolaan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku terus dilakukan secara periodik bulanan untuk mendukung indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon berupa pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Rencana dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IKU 16 : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang

berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian:

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap
3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.
6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon Pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun 2025. Untuk capaian di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)			Target (indeks)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	3	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana mencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian IKU ini antara lain dengan melakukan koordinasi dan menginventaris terkait kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai dan pengembangan jenjang karir ASN di BPBL Ambon.

IKU 17 : Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati

perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 21. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Capaian IKU Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
86	100	116,28	116,28	100	86	116,28

Proses pencapaian rasio pemberitaan dilakukan setiap triwulan berjalan dengan target 86% dan pencapaian IKU ini pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya memiliki tendensi positif.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana mencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Rasio jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya di media online, pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dimana semua pemberitaan terkait sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan bernilai tone positif.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2025 relatif sama bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian presentase jumlah pemberitaan positif telah diperoleh capaian maksimal.

Rencana Tindak lanjut

Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pemberitaan sebagai upaya peningkatan publikasi terkait program prioritas perikanan budidaya;
2. Meningkatkan frekuensi pemberitaan perikanan budidaya baik mencakup teknis maupun non teknis pada berbagai kanal media yang dimiliki sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (media) baik local maupun nasional guna membantu meningkatkan sebaran informasi sub sector perikanan budidaya.

IKU 18 : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pemerintah dan badan publik. Menurut para pakar, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, informasi publik adalah kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, termasuk pemerintahan, lembaga publik, dan badan publik lainnya. Informasi publik mencakup berbagai jenis informasi yang wajib diungkapkan, seperti informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan, kinerja, keuangan, dan kegiatan badan publik.

Tabel 23. Deskripsi Jenis Informasi Publik

No.	Jenis Informasi	Deskripsi
1.	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Informasi ini meliputi informasi tentang profil badan publik, program dan kegiatan, peraturan, keputusan, kebijakan, laporan kinerja, dan laporan keuangan

2.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta	Informasi ini adalah informasi yang apabila tidak segera disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Contohnya informasi tentang bencana, keadaan darurat, atau situasi yang bersifat urgensi.
3.	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	Informasi ini adalah informasi yang sudah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat atas permintaan.
4.	Informasi Yang Dikecualikan	• Rahasia Negara, Informasi yang menyangkut pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi. • Rahasia Pribadi: Informasi tentang data pribadi seseorang yang tidak dapat diakses tanpa izin. • Rahasia Bisnis: Informasi yang bersifat rahasia dan dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. • Informasi yang Belum Dipastikan Kebenarannya: Informasi yang masih dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan.

Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi public lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Indikator ini merupakan salah satu indicator baru dalam perjanjian kinerja 2025, memiliki target sebesar 80 dan perhitungan dilakukan secara tahunan.

Beberapa tantangan dalam proses implementasi keterbukaan informasi publik adalah:

- Masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai UU KIP.
- Beberapa badan publik mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara efektif.
- Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas PPID mengenai hak dan kewajiban dalam keterbukaan informasi.
- Keterbukaan informasi publik juga berperan dalam mendorong inovasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah sosial.

- Selain itu, keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi KKN dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan sumber daya publik.
- Dalam konteks global, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks demokrasi suatu negara, di mana negara yang lebih terbuka cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi.
- Untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan transparan. - Selain itu, penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung aksesibilitas informasi, seperti portal informasi publik yang user-friendly.
- Penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi publik secara lebih luas dan cepat.
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah.
- Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan.
- Keterbukaan informasi juga dapat mendorong inovasi dalam pelayanan publik, di mana masyarakat dapat memberikan ide-ide baru yang dapat diterapkan oleh pemerintah.
- Dalam jangka panjang, keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menciptakan budaya transparansi yang berkelanjutan dalam pemerintahan dan masyarakat. - Hal ini akan memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- Keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan daya saing suatu negara di kancah internasional, karena negara yang transparan cenderung lebih menarik bagi investor.

- Selain itu, keterbukaan informasi publik dapat membantu dalam penanganan isu-isu krusial seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, di mana partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
- Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.
- Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, di mana mereka dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- Upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi harus melibatkan pelatihan bagi petugas publik agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan informatif. Selain itu, perlu ada mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait informasi yang disediakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan partisipasi aktif masyarakat.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon dengan capaian diukur di akhir tahun. Capaian di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24. Capaian IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	80	0

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapaian realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

BPBL Ambon telah menerima penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. Peningkatan capaian pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBL Ambon Tahun 2025 meliputi pengelolaan dokumen dan website PPID BPBL Ambon.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut tidak terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2024.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah Peningkatan capaian pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBL Ambon Tahun 2025 meliputi melakukan reviu kebutuhan dokumen masing masing bidang dalam PPID secara berkala.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure*.

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip daalm tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan.

Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan

organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon di triwulan ketiga ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)			Target (nilai)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	70	0

Capaian IKU ini belum dapat dinilai karena perhitungannya akan dihitung di akhir tahun 2025.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Terkait IKU ini, petugas kearsipan BPBL Ambon telah mulai menginventaris dokumen-dokumen kearsipan dan menginput pada Lembar Kerja Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga (Formulir ASKI KL). Formulir ini berguna untuk mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan arsip, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kearsipan yang telah dilakukan di BPBL Ambon.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 25 dapat diketahui bahwa capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama namun nilai capaian BPBL Ambon relatif sama dengan capaian satker lain, hal ini dikarenakan

indikator kinerja tersebut bersifat tahunan dimana perhitungannya dilakukan pada akhir tahun.

Rencana Tindak lanjut

BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kearsipan dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan arsip serta perbaikan pengelolaan arsip dinamis (aktif dan inaktif), penataan arsip statis.

IKU 20 : Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.

Kendala Budidaya Ikan antara lain :

- Mahalnya harga pakan.
- Susahnya Ketersedian benih yang berkualitas.
- Besarnya biaya pembuatan kolam.
- Waktu pengontrolan setiap saat.
- Pemberian pakan harus tepat waktu.
- Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- Tidak semua species ikan bisa dibudidayakan.

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Yang berhak memiliki kartu ini mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan hingga petambak garam.

Adapun fungsi dari dari kartu KUSUKA ini antara lain sebagai integrasi dari semua kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di KKP menjadi satu Kartu, integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon,

pemanfaatan data dengan Kementerian atau Lembaga lain, prasyarat calon penerima bantuan

Selain menjadi identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, Kartu KUSUKA juga berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tak hanya itu, tapi juga pelayanan, pembinaan, serta sarana pemantauan evaluasi pelaksanaan program KKP.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon di triwulan ketiga ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	80	0

Capaian dan perhitungan IKU ini akan dilakukan pada akhir tahun.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Capaian Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon pada triwulan ini meliputi inventaris data calon penerima bantuan yang disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2025 yang memiliki kartu KUSUKA.

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Dari data di tabel 26 dapat diketahui bahwa Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon sampai dengan Triwulan ketiga Tahun

2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut bersifat tahunan.

Rencana Tindak lanjut

Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan Dinas KP setempat terkait usulan pelaku usaha budidaya ikan harus memiliki akses KUSUKA, sehingga diharapkan setiap kelompok penerima bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah terintegrasi dengan KUSUKA KKP.

IKU 21 : Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proses tertentu. SOP bertujuan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas.

Definisi SOP adalah dokumen yang menjelaskan cara melakukan suatu aktivitas atau proses dengan cara yang terstandarisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan atau panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan tugas tertentu, yang bertujuan untuk mengurangi variasi dalam pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi.

Tujuan SOP adalah SOP membantu memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tugas yang sama mengikuti langkah-langkah yang sama, sehingga hasilnya konsisten. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kualitas produk atau layanan dapat terjaga, SOP berfungsi sebagai alat pelatihan bagi karyawan baru, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melakukan tugas mereka. SOP menetapkan tanggung jawab dan peran setiap individu dalam proses, sehingga memudahkan dalam penilaian kinerja, dan Dalam banyak industri, SOP diperlukan untuk memenuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh badan pengawas.

Capaian Kegiatan

Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon di triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Capaian IKU Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik						
Nama Indikator : Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)						
Triwulan III Tahun 2025			Realisasi TW III Tahun 2024 (%)	Perbandingan Triwulan III 2025 terhadap Triwulan III 2024 (%)	Tahun 2025	
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)			Target (%)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
0	0	0	0	0	65	0

Capaian persentase penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2025 belum ada karena pengukuran IKU ini dilakukan di akhir tahun.

Analisa Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBL Ambon, di mana pencapai realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 9.865.887.984 atau 68,36 % dari pagu anggaran Rp. 14.432.846.000.

Analisa Keberhasilan/kegagalan

Kegiatan inventarisasi, review dan revisi terhadap semua SOP kegiatan di BPBL Ambon telah dilaksanakan untuk memastikan SOP kegiatan tersebut masih relevan dan untuk menjaga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Beberapa SOP yang direvisi berdasarkan hasil audit dari itjen seperti SOP pelayanan dan SOP Penggunaan Sarana Prasarana

Perbandingan Kinerja (tahun lalu dan satker lain)

Capaian nilai kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan ketiga Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan indikator kinerja tersebut tidak terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2024.

Rencana Tindak lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah melakukan telaah pada semua SOP dan revisi / perbaikan terhadap SOP yang tidak sesuai lagi.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2025 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp 24.830.270.000 Berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tahun 2025, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan September 2025 telah tercapai sebesar Rp. 11.769.484.515 atau 47,40% dari total pagu anggaran. Pembagian realisasi alokasi pagu anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.590.872.899 (ii) Belanja Barang sebesar Rp 5.178.611.616; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 0.

Tabel 28. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Triwulan III pada Tahun 2025 dan 2024

JENIS BELANJA	TRIWULAN III TAHUN 2025			TRIWULAN III TAHUN 2024		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	9.385.610.000	6.590.872.899	70,22	8.920.110.000	6.659.241.396	74,65
Barang	15.179.660.000	5.178.611.616	34,12	22.898.939.000	18.025.254.545	78,72
Modal	265.000.000	0	0	1.108.500.000	758.519.975	68,43
Total	24.830.270.000	11.769.484.515	47,40	32.927.549.000	25.443.015.916	77,27

Persentase realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 47,40% dapat dikatakan lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian di triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar 77,27%, hal ini disebabkan oleh adanya blokir atau efisiensi anggaran.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 29. Data realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas Triwulan III tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW III	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	11 unit	958.000.000	200.870.000	Capaian 20,97%
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi calon induk ikan air laut untuk operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.142 ekor	305.968.000	305.968.000	Capaian 100%
		Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586 ekor	1.329.391.000	1.140.271.704	Capaian 85,77%
		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309 sampel	69.414.000	62.205.000	Capaian 89,61%
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel	15.538.000	15.000.000	Capaian 96,54%
		Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	400 orang	160.000.000	2.073.000	Capaian 1,30%
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	72 unit	1.081.300.000	117.567.327	Capaian 10,87%
		Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10.124 kg	222.520.000	194.126.000	Capaian 87,24 %
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84	14.432.846.000	9.865.887.984	Capaian 68,36%
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81			
		Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%			
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%			

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran TW III	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76			
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92			
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5			
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3			
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86%			
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80			
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%			
		Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%			
		Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Ambon (Persen)	65%			

Apabila dilihat berdasarkan jenis kegiatan, maka realisasi belanja terbesar yaitu Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik dengan realisasi sebesar 68,36%. Adapun realisasi belanja terendah berada pada kegiatan Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut dengan realisasi sebesar 5,88%. Rendahnya serapan untuk kegiatan sistem perikanan budi daya rumput laut terkait dengan belum adanya efisiensi atau blokir anggaran pada kegiatan Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat yang akan diselesaikan pada triwulan keempat.

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Berikut adalah uraian tentang evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran di triwulan ketiga tahun 2025 menunjukan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti ZoomUs, whatsapp grup merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas seperti kegiatan Identifikasi dan Verifikasi dokumen administrasi dan teknis calon penerima bantuan, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.

- Kegiatan koordinasi dengan stakeholder sering digunakan sarana elektronik/online untuk mengefisiensi penggunaan anggaran.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan dan sarana pendukung produksi sehingga ketersediaanya berjalan dengan baik.

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan III Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, terdapat upaya-upaya untuk mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja triwulan ketiga pada tahun 2025 telah mencapai target.

4.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada triwulan ketiga tahun 2025, belum ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan di awal tahun, disiasati dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan dan pengaturan sumber daya manusia yang fleksibel dan dengan memperhatikan beban pekerjaan sehingga tidak mempengaruhi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Memasuki triwulan keempat diperkirakan masih terjadi kondisi cuaca yang kurang baik yang dapat mempengaruhi kegiatan budidaya terutama di kegiatan budidaya ikan di keramba jaring apung yang sangat dipengaruhi perubahan parameter lingkungan sekitar. Masih terdapat sedikit kendala teknis seperti masih ditemukannya sarana filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas media pemeliharaan yang siap digunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya serangan ektoparasit dan bakteri, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan potensi serangan penyakit ikan tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan.

4.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan mengurangi sarana perbenihan ikan laut sebagai langkah efisiensi anggaran dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk memproduksi benih ikan laut.
- Melakukan penempatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan beban pekerjaan.
- Telah dilakukan perawatan sarana dan prasarana produksi seperti sand filter dan pembersihan sarana filter guna meningkatkan sistem filtrasi media pemeliharaan pada fasilitas produksi.
- Telah menginstruksikan kepada pegawai untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan benar.
- Melakukan pengujian sampel HPI secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Melakukan perbaikan sarana dan teknik kultur pakan alami skala massal untuk meminimalisir kegagalan dalam kegiatan produksi pakan alami untuk menunjang kegiatan pemeliharaan larva ikan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mempercepat dan memastikan kegiatan prioritas berjalan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan ketiga ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667,
LAMAM www.kkp.go.id SUREL : bpblambon@kkp.go.id

IKU 2. DATA DUKUNG PRODUKSI CALON INDUK IKAN AIR LAUT UNTUK
BANTUAN DAN OPERASIONAL UPT BPBL AMBON (EKOR)
S.D TRIWULAN III TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET	CAPAIAN PRODUKSI CALON INDUK (EKOR)			%
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN SEPTEMBER	TOTAL CAPAIAN (Ekor)	
1.	Kakap Putih	1142	308	700	1008	101,40
2.	Bubara		-	-	-	
3.	Clownfish		70	80	150	
	TOTAL		378	780	1158	101,40

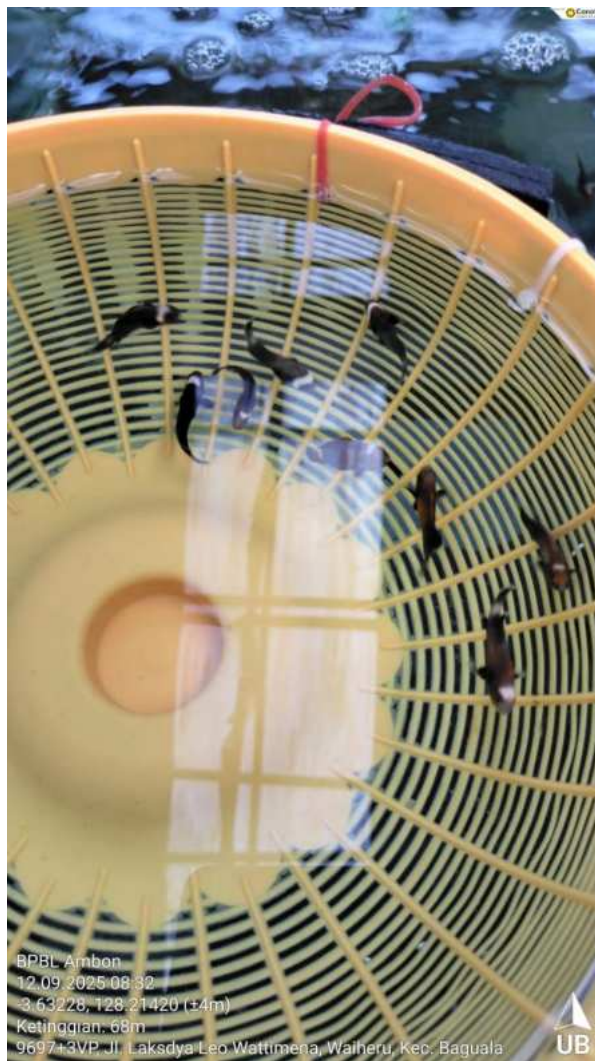
Ambon, 3 Oktober 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Manijo

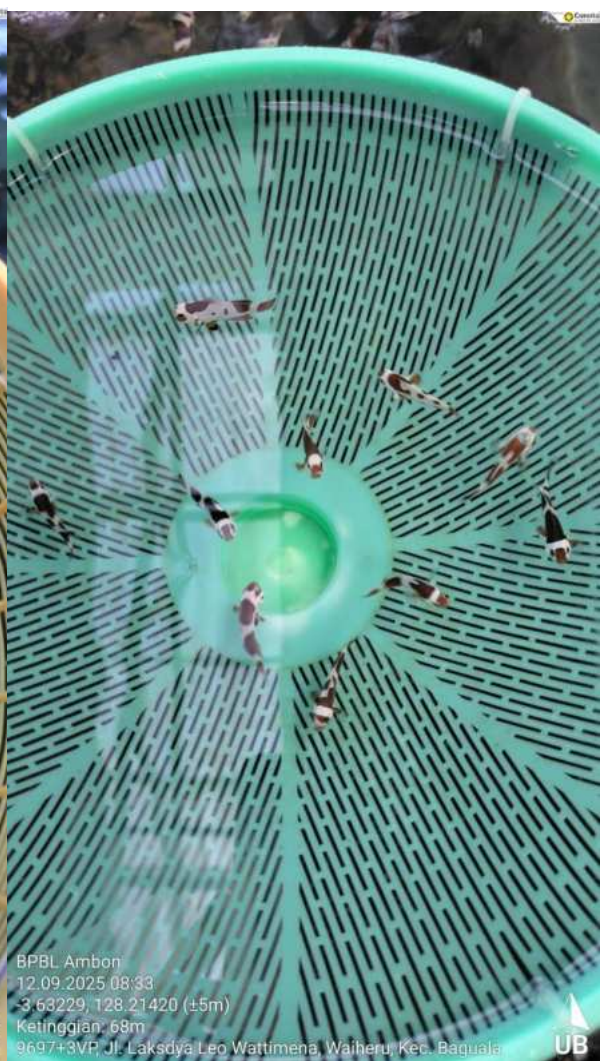


DOKUMENTASI PRODUKSI CALON INDUK :





BPBL Ambon
12.09.2025 08:32
3.63228, 128.21420 (+4m)
Ketinggian: 68m
9697+3VP, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Waiheru, Kec. Baquala



BPBL Ambon
12.09.2025 08:33
3.63229, 128.21420 (+5m)
Ketinggian: 68m
9697+3VP, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Waiheru, Kec. Baquala





DATA DUKUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BENIH IKAN AIR LAUT YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT SATKER BPBL AMBON (EKOR)

Triwulan III_2025



Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bantuan benih ikan laut yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki latar belakang sebagai upaya strategis untuk mendukung pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan budidaya ikan, terutama bagi pembudidaya kecil yang sangat memerlukan benih bermutu yang dihasilkan dari induk unggul. Keterbatasan benih ikan berkualitas menjadi kendala yang menghambat peningkatan produksi perikanan budidaya, oleh karena itu program bantuan benih ikan menjadi prioritas utama KKP untuk memastikan tersedianya benih ikan bermutu secara cukup dan tepat waktu bagi masyarakat pembudidaya.

Adanya bantuan benih ikan laut bermutu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya, memperkuat ketahanan pangan, dan menambah stok sumber daya ikan di perairan umum. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan sebagai kontributor utama ekonomi kelautan Indonesia.

Faktor penyebab kebutuhan benih ikan laut bermutu antara lain sebagai berikut:

1. Benih ikan merupakan faktor penentu utama dalam usaha budidaya ikan, keberhasilan budidaya sangat tergantung pada ketersediaan benih unggul yang sehat dan sesuai ukuran serta kuantitas yang dibutuhkan.
2. Produksi benih secara nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, terutama benih ikan untuk perairan umum dan budidaya laut, sehingga banyak pembudidaya kesulitan mendapatkan benih bermutu.
3. Kualitas benih yang rendah mengakibatkan tingkat kematian tinggi pada fase awal pertumbuhan dan menghambat produktivitas usaha budidaya.
4. Penerapan teknologi pembenihan yang maju diperlukan untuk menghasilkan benih yang sehat, bebas hama penyakit, serta tahan terhadap kondisi lingkungan dan pertumbuhan yang cepat.
5. Faktor teknis seperti kualitas air, sumber air, dan sarana prasarana pembenihan juga mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan.

6. Keterbatasan tenaga ahli dan SDM terlatih di pembenihan menyebabkan produksi benih berkualitas belum optimal.
7. Permintaan pasar terhadap benih ikan yang berkualitas semakin meningkat baik untuk skala usaha kecil maupun besar, sehingga membutuhkan pasokan benih yang terjamin mutu dan kontinuitasnya

Langkah kebijakan untuk memastikan distribusi benih ikan laut merata antara lain meliputi:

1. Pemerintah meningkatkan produksi benih unggul melalui program pengembangan pembenihan yang didukung teknologi canggih untuk memastikan ketersediaan benih berkualitas dalam jumlah cukup.
2. Membangun dan memperkuat infrastruktur distribusi benih agar benih unggul bisa menjangkau pembudidaya di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
3. Menjalin kemitraan dengan petani dan kelompok pembenihan lokal untuk memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan pemahaman serta penggunaan benih unggul.
4. Menyediakan informasi dan edukasi kepada pembudidaya melalui penyuluhan dan media massa agar mereka dapat memilih dan menggunakan benih berkualitas dengan tepat waktu.
5. Mengoptimalkan tata kelola perbenihan melalui sistem sertifikasi dan standardisasi mutu benih, serta memperkuat lembaga sertifikasi independen untuk pengawasan mutu.
6. Menggunakan data berbasis digital untuk manajemen distribusi dan memastikan bantuan dan subsidi benih tepat sasaran dengan meminimalisir penyalahgunaan.
7. Melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi distribusi benih agar program berjalan efektif dan efisien.

Kebijakan ini bertujuan menjembatani kesenjangan akses, memperluas ketersediaan benih bermutu, dan memastikan distribusi benih unggul merata ke seluruh pelosok negeri sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas utama melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi komoditas perikanan,

serta pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Fungsi utamanya dalam memproduksi benih ikan laut unggul meliputi:

1. Produksi induk unggul dan benih bermutu untuk mendukung pengembangan budidaya perikanan laut.
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pembudidaya untuk peningkatan kapabilitas teknis budidaya ikan laut.
3. Pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan untuk menjaga kesehatan benih yang diproduksi.
4. Penyusunan rencana teknis produksi dan evaluasi kegiatan produksi benih ikan.
5. Pelaksanaan uji terap teknologi budidaya dan kerja sama teknis dengan berbagai pihak.
6. Penyediaan bahan standardisasi dan sertifikasi sistem perikanan budidaya untuk menjamin mutu dan kelayakan produk benih.
7. Pengelolaan informasi dan publikasi terkait perikanan budidaya laut.

Balai ini juga berperan melakukan pengawasan dan monitoring kualitas benih ikan laut yang diproduksi agar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan, sehingga mendukung peningkatan produktivitas budidaya ikan laut secara berkelanjutan.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama program bantuan benih ikan laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan, mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, serta menambah stok sumber daya ikan pada perairan umum. Program ini diarahkan untuk menyediakan benih ikan bermutu yang dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, terutama di kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan. Indikator keberhasilan program ini adalah tersalurkannya benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku dan penerima bantuan mampu mengelola budidaya ikan secara optimal. Program bantuan ini juga diharapkan berkontribusi positif terhadap produksi perikanan budidaya nasional.

BAB II

TARGET KINERJA DAN RENCANA AKSI

2.1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian kinerja yang harus diwujudkan atau dicapai oleh individu, tim, atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, target kinerja berfungsi sebagai sasaran terukur yang menjabarkan tujuan besar menjadi hasil kerja yang konkret, spesifik, dan dapat dievaluasi.

Target kinerja yang baik biasanya memenuhi kriteria SMART:

- Specific (Spesifik)
- Measurable (Terukur)
- Achievable (Dapat Dicapai)
- Relevant (Relevan)
- Time-bound (Terikat Waktu)

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Benih Ikan Alr Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586	89.000	117.000	163.000	423.586

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kinerja (RAK atau Renaksi) adalah dokumen perencanaan operasional yang merinci langkah-langkah, tahapan, atau kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan secara periodik (biasanya triwulanan atau bulanan) untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK).

- Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja: RAK disusun segera setelah penetapan Perjanjian Kinerja (PK)—dokumen yang memuat komitmen pencapaian kinerja tahunan antara atasan dan bawahan.
- Penjabaran yang Detil, Sementara PK hanya memuat sasaran, indikator, dan target tahunan, RAK menguraikannya menjadi langkah-langkah *operasional* yang terukur dari waktu ke waktu.

- Pedoman Pelaksanaan, RAK menjadi pedoman utama bagi pelaksana di unit kerja untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai anggaran dan waktu yang ditetapkan.

Tabel 2. Rencana Aksi IKU Benih Ikan Air Laut yang didistribusikan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Tahunan	Target s.d Triwulan			
					I	II	III	IV
Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	proses produksi benih ikan air laut untuk pemenuhan kebutuhan benih ikan yang didistribusikan pada masyarakat	1.329.391.000	4 Laporan	1	2	3	4
Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	Pelaksanaan distribusi bantuan benih ikan laut di wilayah kerja satker BPBL Ambon	1.329.391.000	423.586 Ekor	89.000	117.000	163.000	423.586

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Evaluasi Rencana Aksi

Evaluasi rencana aksi terhadap bantuan benih ikan laut menunjukkan bahwa program ini berperan penting dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya di berbagai daerah Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, KKP telah mendistribusikan jutaan benih ikan laut unggul ke kelompok pembudidaya, dengan capaian distribusi yang bahkan melebihi target di beberapa UPT salah satunya BPBL Ambon. Evaluasi mencakup aspek teknis produksi benih, penyaluran bantuan, serta pendampingan kepada pembudidaya agar benih yang diterima dapat dikelola dengan optimal.

Program bantuan benih ini berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya, serta mendukung target swasembada pangan nasional. Namun, evaluasi juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan benih berjalan efektif dan tepat sasaran. KKP juga memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan untuk memperbaiki kualitas produksi benih serta meningkatkan efisiensi distribusi guna mewujudkan budidaya yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi rencana aksi bantuan benih ikan laut menegaskan bahwa program ini merupakan program prioritas nasional yang mampu menstimulus perkembangan budidaya ikan laut dan memberikan kontribusi nyata terhadap produksi perikanan budidaya Indonesia

Sasaran dari bantuan Benih ikan laut adalah pembudidaya yang berada di kawasan budidaya yang menjadi wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, serta tersalurkannya 423.586 Ekor benih ikan air laut kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan. Target bantuan benih ikan air laut pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon TA. 2025 adalah sebagai berikut,

Tabel 3. Jumlah Bantuan Benih Ikan Laut BPBL Ambon

No.	UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Target Awal (Ekor)	Target s.d Triwulan III (Ekor)
1.	BPBL Ambon	423.586	163.000

Indikator keberhasilan kegiatan bantuan benih ikan laut adalah tersalurkannya bantuan sebanyak 423.586 ekor dengan capaian 100% dari target. Kegiatan Bantuan benih ikan laut ini diharapkan dapat mendukung jaminan ketersediaan Benih ikan laut pada kawasan budidaya secara berkesinambungan khususnya di Provinsi Maluku, dan Maluku Utara.

Realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, bantuan benih ikan laut mencapai 213.500 ekor dari target tahunan 423.586 ekor. Bantuan ini didistribusikan di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara.

Persyaratan penerima bantuan pemerintah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 311 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah benih ikan laut tahun 2024 dan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 81 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah benih ikan laut tahun 2025, Penerima bantuan pemerintah berupa Benih ikan laut kepada kelompok prioritas KKP yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Kelompok Pembudidaya
2. Kelompok masyarakat hukum adat
3. Kelompok swadaya masyarakat
4. Lembaga pendidikan, dan
5. Lembaga keagamaan
6. Koperasi

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dijelaskan bahwa Kelompok pembudidaya ikan selanjutnya disebut pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir. Kelembagaan pelaku utama perikanan memiliki karakteristik sebagai berikut,

- Memiliki jumlah anggota kelompok 10 – 25 orang;
- Pelaku utama yang berada didalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok;

- Memiliki tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- Memiliki kesamaan – kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi dan Bahasa;
- Bersifat informal;
- Memiliki saling ketergantungan antar individu;
- Mandiri dan partisipatif;
- Memiliki aturan atau norma yang disepakati bersama; dan
- Memiliki administrasi yang rapih.

Kelembagaan pelaku utama perikanan yang mandiri dapat terjadi karena adanya pengikat yang kuat diantara mereka. Unsur pengikat tersebut adalah sebagai berikut :

- Adanya kepentingan yang sama;
- Adanya motivasi untuk berkembang diantara mereka;
- Adanya saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab dan saling mempercayai;
- Adanya sentra/kluster/zona yang menjadi tanggungjawab bersama;
- Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas;
- Adanya pengelolaan administrasi, sarana prasarana dan keuangan secara bersama;
- Adanya kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi sebagian besar anggotanya;

Kegiatan bantuan benih ikan laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025 mengarah pada kelompok pembudidaya ikan di beberapa kabupaten Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Adapun lokasi kegiatan bantuan benih ikan laut tersaji pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Sebaran Bantuan benih ikan laut Provinsi Maluku TA. 2025

No	Provinsi	Kabupate/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	Keterangan
1.	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	1 Kelompok	Telah Terealisasi
2.	Maluku	Kota Ambon	1 Kelompok	Telah Terealisasi

Tabel 5. Sebaran Bantuan benih ikan laut Provinsi Maluku Utara TA. 2025

No	Provinsi	Kabupate/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	Keterangan
1.	Maluku Utara	Kepulauan Sula	2 Kelompok	Telah Terealisasi

Data hasil kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Maluku Tengah tersaji pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Maluku Tengah

No.	Uraian	Analisa data
1.	Potensi wilayah	Kabupaten Maluku Tengah dengan luas lautan 264.311,43 Km² (95,80%) memiliki potensi perikanan sangat besar. dengan luas laut yang ada terdapat potensi sumber daya perikanan sebesar 835.400 ton/tahun, Maximum Sustaniable Yield (MSY) sebesar 417.700 Ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 334.160 ton/tahun. Perikanan Maluku tengah disokong oleh dua fishing ground yaitu laut banda dan laut seram yang masuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sedangkan lahan potensi budidaya ikan di Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut : 1. Luas Potensi Lahan Budidaya Mutiara yang tersedia seluas 367,3 Ha meliputi Kecamatan Banda, Pulau Haruku, Leihitu, Telutih, dan Seram Utara. Lahan tersebut belum dimanfaatkan. 2. Luas Potensi Lahan Budidaya Rumput Laut yang tersedia seluas 598,6 Ha yang tersebar di 15 Kecamatan namun belum dimanfaatkan. 3. Luas potensi lahan budidaya Teripang yang tersedia seluas 417,9 Ha tersebar di 15 Kecamatan namun belum dimanfaatkan. 4. Luas Potensi Budidaya Keramba Apung yang tersedia seluas 545,0 Ha, yang telah dimanfaatkan adalah seluas 2,6 Ha, tersebar di kecamatan amahai, seram utara dan seram utara barat sedangkan yang belum dimanfaatkan seluas 542,4 Ha dan tersebar di 10 Kecamatan. 5. Jumlah Produksi hasil Perikanan Budidaya Air tawar/Payau dan Budidaya Laut pada Tahun 2022 adalah sebesar 9.316,17 Ton.

		Jumlah Nilai Produksi Komoditi Hasil Perikanan di Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2022 yang meliputi Budidaya Air Tawar/ Payau dan Budidaya Laut, komoditi Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau dengan jumlah nilai produksi sebesar Rp. 926.813.200.000.
2.	Jenis komoditas	Benih Kakap Putih
3.	Jumlah kelompok pembudidaya	Data kelompok yang diidentifikasi dan Verifikasi Bantuan benih ikan laut Tahun 2025 terdiri dari 1 Kelompok yakni : 1. Pokdakan Kepiting Jaya
4.	Kapasitas produksi	Dapat mencapai rata-rata 1 ton/per tahun
5.	Kegiatan Utama	Kegiatan budidaya ikan kakap putih
6.	Teknologi budidaya	Konvensional
7.	Lokasi	Seram Utara Timur Seti
8.	Wadah budidaya	Budidaya ikan di tambak konvensional
9.	Kepemilikan unit usaha	Kelompok
10.	Tahun pendirian/ operasional	Rata rata kelompok dibentuk pada 2024
11.	Persyaratan Administrasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Telah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah • Telah memiliki E Kusuka • Telah memiliki BPJS Kesehatan • Beranggotakan 10 orang setiap kelompoknya • Hasil produksi budidaya yang dihasilkan bukan untuk kegiatan ekspor • Belum menerima bantuan sejenis yang dibantukan • Anggota kelompok bukan aparat desa/penyuluh perikanan/ASN/TNI POLRI • Bersedia mengelola bantuan yang diterima dengan baik dan melaporkan kegiatan budidaya yang dilaksanakan • Bersedia menandatangani BAST Bantuan yang diterima
12.	Persyaratan Teknis Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Sudah pernah melaksanakan kegiatan budidaya ikan dengan mampu menerapkan cara budidaya ikan yang baik maupun cara pembenihan ikan yang baik • lokasi budi daya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; • memiliki akses yang mudah dijangkau

Kegiatan penyerahan bantuan benih ikan laut di Kabupaten Maluku Tengah, dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 1724/BPBLA/PB.140/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025. Bantuan bibit ditujukan untuk Kelompok pembudidaya Kepiting Jaya. Total benih ikan laut yang didistribusikan sebanyak 50.000 Ekor. Benih ikan laut kakap putih yang diberikan merupakan benih ikan laut hasil budidaya BPBL Ambon.

Data hasil kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok pembudidaya ikan Kota Ambon tersaji pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Pembudidaya Ikan di Kota Ambon

No.	Uraian	Analisa data
1.	Potensi wilayah	kawasan budidaya laut yang efektif hanya di Teluk Ambon dalam sebesar 5.97 km ² , sedangkan kawasan Telu Baguala dan Teluk Ambon Luar merupakan kawasan pendukung budidaya. Luas area budidaya ikan di Kota Ambon sebesar 1.870 ha terdiri atas 1.868,6 Ha untuk Budidaya Air Laut dan 3.139 Ha untuk Budidaya Air Tawar. Potensi pengembangan kawasan budidaya air laut di Kota Ambon terserah pada 3 wilayah pengembangan yaitu Wilayah Perairan Teluk Ambon Dalam (TAD), Teluk Ambon Bagian Luar (TAL), Teluk Baguala
2.	Jenis komoditas	Ikan Kakap Putih, Bubara dan Kerapu
3.	Jumlah kelompok pembudidaya	Data kelompok yang diidentifikasi dan Verifikasi Bantuan benih ikan laut Tahun 2025 terdiri dari 1 Kelompok yakni : 1. Pokdakan Lalosi
4.	Kapasitas produksi	Dapat mencapai rata-rata 1 ton/per tahun
5.	Kegiatan Utama	Kegiatan budidaya kakap putih
6.	Teknologi budidaya	KJA
7.	Lokasi	Poka
8.	Wadah budidaya	Budidaya ikan di Karamba Jaring Apung
9.	Kepemilikan unit usaha	Kelompok
10.	Tahun pendirian/ operasional	Rata rata kelompok dibentuk pada 2020
11.	Persyaratan Administrasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Telah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon • Telah memiliki E Kusuka • Telah memiliki BPJS Kesehatan • Beranggotakan 10 orang setiap kelompoknya • Belum menerima bantuan sejenis yang dibantukan • Anggota kelompok bukan aparat desa/penyuluh perikanan/ASN/TNI POLRI

		- Bersedia mengelola bantuan yang diterima dengan baik dan melaporkan kegiatan budidaya yang dilaksanakan - Bersedia menandatangani BAST Bantuan yang diterima
12.	Persyaratan Teknis Calon Kelompok Penerima Bantuan	- Sudah pernah melaksanakan kegiatan budidaya ikan - lokasi budi daya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; - memiliki akses yang mudah dijangkau

Kegiatan penyerahan bantuan benih ikan laut di Kota Ambon, dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 1851/BPBLA/PB.140/IX/2025 tanggal 18 September 2025. Bantuan benih ikan ditujukan untuk Kelompok pembudidaya Lalosi. Total benih ikan laut yang didistribusikan sebanyak 5000 Ekor. Benih ikan laut kakap putih yang diberikan merupakan benih ikan laut hasil budidaya BPBL Ambon.

Data hasil kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok pembudidaya ikan Kabupaten Kepulauan Sula tersaji pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kepulauan Sula

No.	Uraian	Analisa data
1.	Potensi wilayah	Kabupaten Kepulauan Sula adalah perikanan rakyat. Produksi perikanan sangat beragam dengan kesediaan potensi 80.547,81 ton/tahun dan potensi lestari sebesar 40.273,91 ton/tahun dengan <i>standing stock</i> pelagis (permukaan) 33.060,94 ton/ tahun serta ikan demersal (dasar) 16.875,61 ton/tahun di mana pemanfaatan untuk kedua komoditas ini baru mencapai 11.506,53 ton/tahun atau 22,8 persen dari potensi lestari.
2.	Jenis komoditas	Ikan Kakap Putih, Bubara
3.	Jumlah kelompok pembudidaya	Data kelompok yang diidentifikasi dan Verifikasi Bantuan benih ikan laut Tahun 2025 terdiri dari 2 Kelompok yakni : - Pokdakan Bersatu - Pokdakan Koperasi Maju
4.	Kapasitas produksi	Dapat mencapai rata-rata 1 ton/per tahun
5.	Kegiatan Utama	Kegiatan budidaya kakap putih dan Bubara
6.	Teknologi budidaya	KJA
7.	Lokasi	Mangoli Barat
8.	Wadah budidaya	Budidaya ikan di Karamba Jaring Apung

9.	Kepemilikan unit usaha	Kelompok
10.	Tahun pendirian/ operasional	Rata rata kelompok dibentuk pada 2024
11.	Persyaratan Administrasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Telah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula • Telah memiliki E Kusuka • Telah memiliki BPJS Kesehatan • Beranggotakan 10 orang setiap kelompoknya • Belum menerima bantuan sejenis yang dibantukan • Anggota kelompok bukan aparat desa/penyuluh perikanan/ASN/TNI POLRI • Bersedia mengelola bantuan yang diterima dengan baik dan melaporkan kegiatan budidaya yang dilaksanakan • Bersedia menandatangani BAST Bantuan yang diterima
12.	Persyaratan Teknis Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Sudah pernah melaksanakan kegiatan budidaya ikan • lokasi budi daya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; • memiliki akses yang mudah dijangkau

Kegiatan penyerahan bantuan benih ikan laut di Kepulauan Sula, dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 1965 - 1966/BPBLA/PB.140/IX/2025 tanggal 25 September 2025. Bantuan benih ikan ditujukan untuk Kelompok pembudidaya Bersatu dan Koperasi Maju. Total benih ikan laut yang didistribusikan sebanyak 8000 Ekor. Benih ikan laut kakap putih yang diberikan merupakan benih ikan laut hasil budidaya BPBL Ambon.

Beberapa Kendala yang ditemui dalam kegiatan budidaya ikan laut meliputi beberapa aspek berikut antara lain :

1. Manajemen Pakan

- Efisiensi pemberian pakan masih menjadi kendala utama, termasuk penggunaan jenis pakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan kakap putih dan pola pemberian pakan yang tidak tepat. Pakan berkualitas rendah mempengaruhi laju pertumbuhan dan dengan tingkat konsumsi pakan yang rendah dapat memicu peningkatan sisa pakan yang tidak termakan dan dapat

mencemari air budidaya. Pemilihan dan pembatasan pakan dari jumlah jenis dan ukuran yang seharusnya juga dapat mempengaruhi produktivitas benih ikan budidaya.

- Fluktuasi parameter kualitas air dapat menyebabkan stres pada ikan sehingga menurunkan nafsu makan dan efisiensi pakan.

2. Kualitas Air dan Lingkungan Budidaya

- Kondisi lingkungan yang kurang stabil seperti perubahan suhu, salinitas, dan kualitas dasar perairan (misal dasar berlumpur) dapat berdampak buruk pada kesehatan dan pertumbuhan ikan. Tata kelola lingkungan budidaya memegang peranan penting dalam upaya peningkatan produktivitas benih ikan laut.
- Pengelolaan kualitas air yang kurang baik menyebabkan lingkungan budidaya menjadi kurang optimal, berpotensi menyebabkan tingginya kematian atau mortalitas benih ikan yang dipelihara

3. Hama dan Penyakit

- Serangan hama seperti ikan buntal dan burung pemangsa, serta penyakit ikan merupakan kendala serius yang dapat menyebabkan kematian massal. Manajemen Kesehatan ikan termasuk Pemantauan kesehatan ikan secara rutin dan penggunaan obat yang tepat sangat diperlukan.

4. Teknik Budidaya dan Pengelolaan

- Keterbatasan teknik pemijahan, pembenihan, dan pembesaran yang optimal menjadi faktor kendala dalam produksi kakap putih. Teknik seperti manipulasi lingkungan air (ketinggian air, suhu) memerlukan pemahaman dan penerapan yang tepat untuk keberhasilan produksi.
- Masih terdapat human error seperti keterlambatan melakukan grading benih yang mempengaruhi kelulushidupan benih.

5. Ekonomi Budidaya

- Harga pakan yang mahal dan belum optimalnya penggunaan pakan menjadi kendala yang mengurangi keuntungan pembudidaya.
- Teknik panen dan pasca panen yang belum efisien juga mempengaruhi nilai jual dan pendapatan pembudidaya.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menuntut upaya peningkatan kualitas manajemen pakan, pengelolaan kualitas air, teknik budidaya yang lebih maju, serta pengendalian hama dan penyakit yang efektif untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan kakap putih.

Beberapa rekomendasi teknis yang dapat diberikan pada usaha perbenihan untuk menghasilkan benih ikan laut yang berkualitas meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pemilihan Benih Unggul

- Pilih benih ikan yang sehat, seragam ukuran, aktif bergerak, dan bebas dari penyakit. Benih berasal dari induk unggul dengan proses pembenihan yang terkontrol untuk mendapatkan benih berkualitas tinggi.
- Lakukan karantina benih sebelum ditebar untuk mencegah penyebaran penyakit.

2. Pengelolaan Kualitas Air

- Pantau dan jaga kualitas air kolam dengan parameter yang sesuai (oksigen terlarut, suhu, pH, amoniak, dan nitrit) agar mendukung pertumbuhan optimal benih ikan.
- Gunakan teknologi seperti sistem bioflok atau sistem resirkulasi air (RAS) untuk mengelola limbah dan mempertahankan kualitas air.

3. Manajemen Pakan

- Berikan pakan dengan dosis tepat, berkualitas baik, dan sesuai kebutuhan benih untuk memaksimalkan pertumbuhan dan meminimalkan limbah pakan.
- Gunakan pemberian pakan otomatis jika memungkinkan untuk efisiensi dan pengendalian limbah.

4. Pengendalian Penyakit

- Lakukan monitoring kesehatan benih secara rutin dan pencegahan melalui sanitasi kolam, penggunaan probiotik, dan karantina benih.
- Terapkan manajemen yang baik dalam pengaturan padat tebar benih dan pemeliharaan lingkungan budidaya.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

- Lakukan evaluasi secara berkala terhadap pertumbuhan benih, kondisi air, dan tingkat kelulusan hidup benih untuk penyesuaian manajemen budidaya.

6. Penggunaan Teknologi Modern

- Terapkan teknologi pembenihan terkini seperti bioflok yang memanfaatkan bakteri pengurai limbah dan RAS yang mengolah air bekas budidaya agar bisa digunakan ulang, untuk efisiensi biaya dan ramah lingkungan.

Rekomendasi ini membantu usaha budidaya benih ikan menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan dengan hasil bibit yang unggul dan sehat.



Gambar 1. Serah Terima Bantuan Benih Ikan Laut

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah tingkat realisasi (pencapaian nyata) dari tolok ukur spesifik yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan.

Tabel 8. Capaian IKU Benih ikan laut yang didistribusikan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN III			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Persentase Terhadap Target Tahunan (%)
Terkelolanya sistem perikanan budi daya ikan air laut	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	423.586	163.000	213.500	130%	50,40 %

Capaian IKU Benih ikan laut yang didistribusikan kepada masyarakat yang dilaksanakan satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 213.500 ekor atau 130%, target capaian kinerja untuk IKU ini terhadap target tahunan baru mencapai 50,40%.

BAB IV

KESIMPULAN

Kegiatan bantuan prioritas benih ikan laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025 telah dilaksanakan, disalurkan di tiga Kabupaten Kota yakni Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 50.000 ekor, Kota Ambon sebanyak 5000 ekor dan Kabupaten kepulauan sula sebanyak 8000 ekor. Total bantuan yang telah terealisasi sebanyak **213.500 Ekor** atau **130%** terhadap target triwulan III dan 50,40% terhadap target tahunan. Penetapan target bantuan benih ikan laut belum mengalami perubahan walaupun adanya efisiensi anggaran. Bantuan yang telah disalurkan akan tetap dipantau perkembangannya dengan melibatkan peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan Penyuluh Perikanan. Perkembangan budidaya rumput laut di Maluku dan Maluku Utara menjadi salah satu potensi besar yang harus dijaga dan dikelola dengan regulasi yang tepat.

Ambon, 7 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Kerja Induk dan Benih



Rochman Subiyanto, M.Si

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi



DATA DUKUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAMPEL PENYAKIT IKAN AIR LAUT

YANG DIUJI DALAM RANGKA

PELAYANAN LABORATORIUM

KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

SATKER BPBL AMBON (SAMPEL)

Triwulan III_2025



Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan budidaya laut. Dalam rangka pembangunan nasional, sektor perikanan budidaya diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di tingkat global dan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di wilayah timur Indonesia khususnya di Maluku, perikanan budidaya laut merupakan salah satu sub sektor kegiatan KP yang sangat penting. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BPBL Ambon memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan teknologi, produksi benih berkualitas, serta penyediaan pelayanan teknis untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya laut di wilayah kerjanya. BPBL Ambon terutama fokus pada komoditas seperti kerapu, kakap putih, ikan bubar, clownfish dan rumput laut.

Kualitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu kesehatan ikan/benih dan kondisi lingkungan budidaya (air). Tanpa pengawasan kualitas yang baik, usaha budidaya bisa mengalami kegagalan karena penyakit ikan atau penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengujian sampel adalah kegiatan yang sangat penting dalam tugas dan fungsi BPBL Ambon.

Aktivitas ini mencakup beberapa hal: Pengujian kesehatan ikan dan benih: Untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mencegah penyakit serta hama yang bisa merugikan ekonomi. Sampel yang diuji meliputi jaringan ikan, benih, dan induk. Pengujian kualitas air dan lingkungan budidaya: Untuk memantau kondisi fisik, kimia, dan biologis air di sekitar lokasi budidaya. Contohnya seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut (DO), dan kandungan bakteri. Hasil pengujian ini sangat penting untuk memastikan kondisi air sesuai dengan standar mutu yang diperlukan untuk budidaya. Pengujian kualitas sarana produksi: Termasuk pemeriksaan kualitas pakan alami, seperti fitoplankton, serta alat bantu produksi lainnya yang digunakan.

Kualitas air yang buruk adalah faktor stres utama yang membuat ikan lebih rentan terhadap penyakit. Ikan yang mengalami stres akibat kondisi air sub-optimal (misalnya, oksigen

terlarut rendah, pH ekstrem, atau kadar amonia tinggi) akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga mudah terserang oleh agen infeksius seperti bakteri dan virus.

Parameter Kualitas Air Kritis	Dampak pada Kesehatan Ikan
Oksigen Terlarut Rendah	Menyebabkan stres, gangguan pernapasan, dan penurunan kekebalan.
Amonia (NH ₃) Tinggi	Bersifat toksik, merusak insang, dan menyebabkan stres kronis.
pH Ekstrem	Mengganggu keseimbangan osmotik dan merusak kulit serta insang.
Suhu Air Fluktuatif/Ekstrem	Menyebabkan stres termal dan dapat memicu munculnya penyakit tertentu (misalnya, <i>Koi Herpesvirus</i> aktif pada suhu tertentu).

Pengujian kualitas air secara rutin berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk menjaga lingkungan budidaya tetap optimal, sehingga dapat mencegah stres pada ikan dan mengurangi risiko wabah penyakit.

Pengujian mikrobiologi bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi keberadaan mikroorganisme patogen (penyebab penyakit) pada sampel ikan dan lingkungan air. Pengujian ini membantu mengidentifikasi bakteri berbahaya yang sering menyebabkan penyakit infeksi pada ikan, seperti *Aeromonas sp.*, *Vibrio sp.*, atau *Edwardsiella sp.*. Bakteri ini sering bersifat oportunistik, artinya mereka sudah ada di lingkungan air, namun baru menyebabkan penyakit parah (seperti septicemia) ketika ikan sedang stres akibat kualitas air yang buruk.

Dengan mengetahui jenis bakteri, parasit (seperti *protozoa* atau *jamur*), dan total mikroba lainnya (Total *Vibrio*, Total Bakteri, Total *E. Coli*), petambak atau teknisi kesehatan ikan dapat:

- Mendiagnosis penyakit secara tepat.
- Menentukan jenis pengobatan (misalnya, antibiotik yang spesifik) atau tindakan biosekuriti yang diperlukan.

Penyakit viral (virus) seringkali menjadi ancaman paling serius dalam budidaya karena tidak ada obatnya dan sering menyebabkan kematian massal (mortalitas tinggi) dengan cepat. Pengujian virus, khususnya menggunakan teknik Biologi Molekuler seperti PCR (Polymerase Chain Reaction), sangat krusial untuk:

- Mengidentifikasi virus karantina secara cepat, bahkan sebelum timbul gejala klinis yang parah (sub-klinis). Contoh virus penting: *Koi Herpesvirus* (KHV), *Viral Nervous Necrosis* (VNN), *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) pada udang, dan *Tilapia Lake Virus* (TiLV) pada Nila.
- Mencegah penyebaran ke wilayah atau komoditas lain melalui penerapan karantina dan pemusnahan yang tepat jika terdeteksi positif.

Pengujian virus adalah komponen penting dari biosekuriti perikanan. Hasil pengujian menjadi syarat wajib untuk lalu lintas domestik dan ekspor/impor ikan dan produk perikanan, untuk memastikan komoditas yang diperdagangkan bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

1.2. Tujuan Kegiatan

Pengujian sampel Kesehatan ikan dan lingkungan merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon untuk memastikan biosekuriti (keamanan hayati) yang kuat, mendukung produksi perikanan budidaya yang aman dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada upaya global untuk mencegah terjadinya kematian massal ikan budidaya akibat wabah penyakit ikan.

BAB II

TARGET KINERJA DAN RENCANA AKSI

2.1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian kinerja yang harus diwujudkan atau dicapai oleh individu, tim, atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, target kinerja berfungsi sebagai sasaran terukur yang menjabarkan tujuan besar menjadi hasil kerja yang konkret, spesifik, dan dapat dievaluasi.

Target kinerja yang baik biasanya memenuhi kriteria SMART:

- Specific (Spesifik)
- Measurable (Terukur)
- Achievable (Dapat Dicapai)
- Relevant (Relevan)
- Time-bound (Terikat Waktu)

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Pengujian Sampel Keskanling

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309	73	103	119	309

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kinerja (RAK atau Renaksi) adalah dokumen perencanaan operasional yang merinci langkah-langkah, tahapan, atau kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan secara periodik (biasanya triwulanan atau bulanan) untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK).

- Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja: RAK disusun segera setelah penetapan Perjanjian Kinerja (PK)—dokumen yang memuat komitmen pencapaian kinerja tahunan antara atasan dan bawahan.
- Penjabaran yang Detil, Sementara PK hanya memuat sasaran, indikator, dan target tahunan, RAK menguraikannya menjadi langkah-langkah *operasional* yang terukur dari waktu ke waktu.
- Pedoman Pelaksanaan, RAK menjadi pedoman utama bagi pelaksana di unit kerja untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai anggaran dan waktu yang ditetapkan.

Tabel 2. Rencana Aksi IKU Pengujian Sampel Keskanling

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Tahunan	Target s.d Triwulan			
					I	II	III	IV
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	Dilakukan pengujian sampel Kuskanling mencakup kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler	69.414.000	309	73	103	119	309

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Evaluasi Rencana Aksi

3.1.1 Kejadian penyakit

3.1.1.1. Pengujian Sampel Parasit

Alat dan bahan

Alat :

mikroskop, peralatan bedah (gunting, pisau bedah, pinset, pengait), papan alas bedah, kaca preparat, *coverslip*, timbangan digital, penggaris, pipet tetes.

Bahan :

sampel uji, tisu gulung, air laut.

Sampel uji diperoleh dari sampel ikan dari unit-unit produksi internal atau dari sampel eksternal. Selain itu juga dari hasil monitoring di lapangan dimana petugas pengambil sampel melakukan pengambilan dengan aktif secara *purposive* (ditentukan) yaitu ikan yang diduga terinfeksi parasit untuk kemudian dibawa ke laboratorium.

Metode pengujian parasit dilakukan secara mikroskopis dan mencocokkan dengan buku referensi/literatur.

Tabel 3. Hasil Kegiatan Pengujian

No.	Tanggal	Jenis parasit	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
1	01	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	RAS. R.E2 Aq.9
2	01	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M.6 Aq. 7
3	01	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBP. No.21
4	01	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBK. No.3
5	02	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M.1 Aq.22
6	02	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBB No. 1
7	02	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBK No. 7
8	02	<i>Cryptocaryon irritans</i> <i>Cyst</i> <i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	RAS R.D1 Aq.4
9	03	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan Meja 2 Aq. 16

No.	Tanggal	Jenis parasit	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
		<i>Cyst Pseudorhabdosynochus</i>			
10	03	<i>Cyst Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBB No.3
11	03	<i>Cryptocaryon irritans</i> <i>Cyst Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBP No. 16
12	03	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBK. No. 11
13	03	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	RAS RD.2 Aq.4
14	04	<i>Amyloodinium Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBP No. 27
15	04	Neg Parasit	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBB No. 1
16	04	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	RAS RD1 Aq. 6
17	04	<i>Uronema</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Pendederan M.3 Aq. 25
18	04	Neg Parasit	1	Kakap Putih (6 cm)	Gedung Buru Bak. 6
19	04	Neg Parasit	1	Kakap Putih (3 cm)	Gedung Buru Bak.4
20	08	<i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M. 3 Aq.03
21	08	<i>Amyloodinium</i> Hipeplasia	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBK. No. 4
22	08	<i>Amyloodinium</i> Hipeplasia	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBK. No. 13
23	08	Neg Parasit	1	Clown Fish (1-2 cm)	Outdoor BBP. No. 26
24	09	<i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Pendederan M. 1 Aq.12
25	09	<i>Pseudorhabdosynochus</i> <i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBB. No. 4
26	09	Neg Parasit Hiperplasia	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBK. No. 4
27	10	<i>Uronema</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBK. No. 29
28	10	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.2 Aq. 6
29	10	Neg Parasit Necrosis Insang Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBB. No. 2
30	11	<i>Pseudorhabdosynochus</i> <i>Uronema</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Pendederan M. 5 Aq. 17
31	11	Neg Parasit Hiperplasia	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBP. No. 26
32	11	<i>Cryptocaryon irritans</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBB. No. 4
33	11	<i>Uronema</i> <i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBK. No. 7
34	11	<i>Uronema</i> <i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (3 cm)	Pendederan M.4 Aq. 2

No.	Tanggal	Jenis parasit	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
		<i>Hyperplasia</i>			
		Necrosis Insang			
35	11	<i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.3 Aq. 10
36	11	Neg Parasit Necrosis Insang Hiperplasia	1	Kakap Putih (3 cm)	Gedung Buru Bak. 4
37	12	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.1 Aq. 14
38	12	Neg Parasit Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBP. No.24
39	12	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBB. No.24
40	12	<i>Scuti</i>	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBB. No. 11
41	15	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M.5 Aq. 2
42	15	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M.1 Aq. 14
43	15	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Outdoor BBP. No. 23
44	15	<i>Cryptocaryon irritans</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i> Gas Bubble	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBB. No. 9
45	16	<i>Pseudorhabdosynochus</i> <i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M.1 Aq. 17
46	16	<i>Pseudorhabdosynochus</i> <i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBB. No. 2
47	16	<i>Cryptocaryon irritans</i> Gas Bubble	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBP. No. 16
48	17	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (3-4 cm)	Outdoor BBB No.13
49	17	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1-2 cm)	Pendederan M.1 Aq. 8
50	18	Neg Parasit Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBP No.2
51	18	<i>Cryptocaryon irritans</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBK No.16
52	18	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.1 Aq.2
53	18	<i>Cryptocaryon irritans</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (1 cm)	RAS RB.2 Aq.2
54	19	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBK No.8
55	19	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.1 Aq.14
56	22	<i>Cryptocaryon irritans</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.1 Aq.3
57	22	Neg Parasit Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.1 Aq.4

No.	Tanggal	Jenis parasit	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
58	22	Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.1 Aq.5
59	22	Neg Parasit Necrosis Insang	1	Kakap Putih (3 cm)	Gedung Buru Bak. Fiber
60	22	<i>Amyloodinium</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBK No.3
61	22	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBK No.16
62	23	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBK. No. 3
63	23	<i>Cryptocaryon irritans</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (2-3 cm)	Outdoor BBK. No. 27
64	23	<i>Cryptocaryon irritans</i> Cyst <i>Pseudorhabdosynochus</i>	1	Clown Fish (2 cm)	Pendederan M.1 Aq. 1
65	24	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Pendederan M.7 Aq. 17
66	24	Neg Parasit Hiperplasia	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBP. No. 28
67	24	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (3-4 cm)	Pendederan
68	24	Neg Parasit	1	Kerapu Bebek (D.4)	Gedung Seriola
69	25	<i>Amyloodinium</i> Hiperplasia	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.7 Aq. 2
70	25	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Pendederan M.7 Aq. 7
71	25	<i>Cryptocaryon irritans</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBP. No. 26
72	25	<i>Amyloodinium</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBB. No. 11
Jumlah			72		

Hasil pemeriksaan parasit dan jamur sampel External pada bulan September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tanggal	Jenis parasit	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
1	-	-	-	-	-
Jumlah			0		

3.1.1.2. Pengujian Sampel Bakteri

Alat dan Bahan

Alat :

Laminair flow, incubator, colony counter, jarum ose (*loop*), bunsen, cawan petri, oven, chiller, refrigerator, autoklaf, analytical balance, magnetic hotplate stirrer.

Bahan :

TCBS Agar, Tryptic Soy Agar (TSA), Plate Count Agar (PCA), Larutan trisalt (NaCl, KCl, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$), media OF, media MRVP, uji katalase, uji oksidase, reagen uji gram, TSIA, Uji Citrat, uji karbohidrat (glukosa, sukrosa, arabinosa, inositol, mannitol), arginine dihidrolisis, lysine decarboxylase, ornithine decarboxylase, media SIM, uji sensitivitas O129 (10 µg dan 150 µg).

Metodologi

Sampel uji berupa sampel ikan dan sampel air baik internal maupun eksternal. Kondisi sampel ikan harus masih segar, baru mati, atau masih hidup dan belum busuk. Identifikasi bakteri dengan metode pengujian biokimia dan mengacu pada Bergey's Manual.

Metode pengujian yang digunakan tersaji pada tabel berikut :

Ruang Lingkup Pengujian	Parameter	Metode
Bakteri	1. Total Bakteri (ALT)	Metode cawan agar sebar
	2. Total <i>Vibrio</i> (ALT)	Metode cawan agar sebar
	3. Jenis Bakteri	Cowan and Steel's (Konvensional/biokimia)

Hasil kegiatan

Tabel 4. Hasil Uji Mikrobiologi Non AMR

No.	Tanggal	Jenis bakteri	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
1	08	<i>Vibrio alginolyticus</i>	1	Kerapu Bebek (Induk)	Bak Induk (KB.030825)
2	24	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Clown Fish (2 cm)	Outdoor BBP. No.2 (CF.180925.1)
3	24	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Clown Fish (1 cm)	Outdoor BBR. No.16 (CF.180925.2)
4	24	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Clown Fish (2 cm)	Pendederan M.1 Aq.2 (CF.180925.3)
JUMLAH			4		

Mikrobiologi AMR

Jumlah sampel AMR bulan September 2025

No.	Kerapu	Kakap Putih	Ikan Kuwe
1	0	0	0

Identifikasi jenis bakteri pada sampel AMR perolehan bulan September 2025

No	Tanggal	Jenis bakteri	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
1	04	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Kakap putih (10 cm)	Pokdakan Kepiting Jaya (Wagito)
2	04	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Kakap putih (10 cm)	Pokdakan Kepiting Jaya (Kaimudin)
3	04	<i>Vibrio vulnificus</i>	1	Ikan Bubara (200 gr)	Pokdakan Alam Nyata
4	04	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Kakap putih (300 gr)	Pokdakan Indah Jaya

Hasil Uji AST sampel AMR perolehan bulan September 2025

No	Komoditas	Target Sampel	Realisasi	Target Bakteri	Hasil identifikasi		Hasil Uji AST	Lokasi sampling
					positif	negatif		
1	Kerapu	0	0	<i>Vibrio alginolyticus</i>	0	0	-	Kab. Maluku Tengah
2	Kakap Putih	1	3	<i>Vibrio alginolyticus</i>	0	3		Kab. Maluku Tengah
3	Ikan Kuwe	1	1	<i>Vibrio alginolyticus</i>	0	1		Kab. Maluku Tengah

Total bakteri umum (TBU) dan total bakteri lain sampel air:

Tanggal	Lokasi	TBU (koloni/ml)	TBV (koloni/ml)	Keterangan
03	KJA Ikan Konsumsi	$1,7 \times 10^{11}$	$4,8 \times 10^3$	
	KJA Ikan hias dan Lobster	$1,02 \times 10^9$	$2,7 \times 10^2$	
	Rumput Laut KJA	TBUD	$2,9 \times 10^3$	
10	KJA Ikan Konsumsi	TBUD	$8,14 \times 10^2$	
	KJA Ikan hias dan Lobster	TBUD	$2,62 \times 10^3$	
	Rumput Laut KJA	TBUD	$1,1 \times 10^3$	
17	KJA Ikan Konsumsi	TBUD	$\leq 0,25 \times 10^2$	
	KJA Ikan hias dan Lobster	TBUD	$\leq 0,25 \times 10^2$	
	Rumput Laut KJA	TBUD	$\leq 0,25 \times 10^2$	
24	KJA Ikan Konsumsi	TBUD	$\leq 0,25 \times 10^2$	
	KJA Ikan hias dan Lobster	TBUD	$\leq 0,25 \times 10^2$	
	Rumput Laut KJA	TBUD	$\leq 0,25 \times 10^2$	
01	ST.1	-	TBUD	Ext./Novianty C Tuhumury
	ST.2	-	TBUD	

3.1.1.3. Virus

Alat dan bahan

Alat :

Mesin PCR (*Thermal cycler*), mikrocentrifuge, biology safety cabinet, mini mixer, mikropipet, digital foto system.

Bahan :

VNN test kit, iridovirus test kit, ethanol 95%, ethanol 75%

Metodologi

Sampel uji VNN adalah telur, larva atau benih dengan organ target mata dan otak, untuk larva digunakan seluruh bagian tubuhnya. Sampel uji iridovirus organ target adalah insang, limpa atau

hati. Metode pengujian sesuai manual instruksi dari IQPlus VNN Kit untuk pengujian VNN, sedangkan IQPlus Irido-M Kit untuk pengujian iridovirus.

Tabel 5. Hasil kegiatan

No.	Tanggal	Jenis sampel	Ukuran	Jumlah Pengujian	Asal	Jenis pengujian	Hasil
1	01	Kakap putih	7-10 cm	1	Tambak Kobisonta	VNN	Negatif
		Jumlah		1			

3.1.1.4. Kegiatan Monitoring Kualitas Air

Alat dan bahan

Alat:

DO meter, refraktometer, pH meter, spektrofotometer, secchidisk, turbiditymeter.

Bahan:

bahan uji nitrit, bahan uji ammonia, bahan uji nitrat, bahan uji ortofosfat, bahan uji kesadahan, bahan uji alkalinitas, bahan uji bahan organik total (TOM), akuades.

Metodologi

Pengambilan sampel air dilakukan secara periodik di unit-unit pembenihan, pakan alami, pembesaran di KJA dan laboratorium kultur jaringan.

No	Ruang Lingkup Pengujian	Parameter	Metode
1	Kualitas air	Suhu	SNI 06-6989.23-2005 dan thermometer digital
		Salinitas	Refraktometrik
		Oksigen terlarut	DOmeter digital
		pH	SNI 06-6989.11-2019 (pH meter digital)
		Nitrit (NO_2^-)	SNI 19-6964.1-2003 (Spektrofotometrik)
		Amoniak (NH_3)	SNI 19-6964.3-2003 (Spektrofotometrik)
		Nitrat (NO_3^-)	SNI 19-6964.7-2003 (Spektrofotometrik)
		Ortofosfat (PO_4^{3-})	Spektrofotometrik
		Kekeruhan	SNI 06-6989.25-2005 (turbidimetrik)
		Kesadahan	Carbonate hardness test (titrasi)
		Kecerahan	Secchi disk
		Alkalinitas	Alkalinity test (titrasi)
		TOM	(SNI 06-6989.22-2004) Permanganometri

Hasil Kegiatan monitoring kualitas air

Tabel 6. kisaran dan rata-rata kualitas air selama satu bulan pada unit-unit produksi

	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Salinitas (ppt)	pH	DO (mg/l)
Bak Induk 1				
Kisaran	26.0-26.6	33-33	7.94-8.33	5.3-6.1
Rata-rata	26.3	33	8.13	5.7
Bak Induk 2				
Kisaran	-	-	-	-
Rata-rata	-	-	-	-
Bak Larva				

	Suhu (°C)	Salinitas (ppt)	pH	DO (mg/l)
Kisaran	27.0-27.7	34-35	7.89-7.91	5.8-5.8
Rata-rata	27.4	34.5	7.90	5.8
Hatchery Ikan Hias				
Kisaran	27.3-27.3	36-36	8.20-8.20	5.4-5.4
Rata-rata	27.3	36	8.20	5.4
Pendederan				
Kisaran	-	-	-	-
Rata-rata	-	-	-	-

Tabel 7. Kualitas Air Harian Hatchery

No. Bak	Tanggal	Parameter Kualitas Air						Keterangan
		Suhu (°C)	Salinitas (ppt)	pH	DO (mg/l)	NO ₂ ⁻ (mg/l)	NH ₃ -N (mg/l)	
Buru								
C4	11	27,7	35	7,91	5,80	0,021	0,255	kakap
C5	18	27	34	7,89	5,30	0,135	1,027	kakap
Induk								
KM2	01	26	33	7,94	5,30	0,022	0,033	macan
KM2	08	26,6	33	8,33	6,10	0,014	0,048	macan
RAS								
RA2	12	27,3	36	8,20	5,40	0,008	0,040	clownfish

Ket: Standar baku mutu kualitas air tersaji pada tabel berikut :

No	Parameter	Standar/Kriteria	Acuan/Referensi	Keterangan
1	Suhu	alami coral 28-30°C mangrove 28-32°C lamun 28-30°C	PP 22/2021	
2	Salinitas	alami coral 33-34 ppt mangrove s/d 34 ppt lamun 33-34 ppt	PP 22/2021	
3	DO	>5 mg/l	PP 22/2021	
4	pH	7-8.5	PP 22/2021	
5	Nitrit (NO ₂ ⁻)	0,01-0,03 mg/l	UNESCO/WHO/UNEP, 1992	Standar EC
		<0.06 mg/l	UNESCO/WHO/UNEP, 1992	Standar Kanada
		<0.06 mg/l	PP No. 20/1990	Gol C (perikanan)
		<0.05 mg/l	SEAFDEC, 2001	-
6	Amonia total (NH ₃ -N)	0.3 mg/l	PP 22/2021	
7	Nitrat (NO ₃ ⁻)	0.06 mg/l	PP 22/2021	
8	Alkalinitas	>40 mg/l CaCO ₃	Effendi, 2003	Sadah / <i>hardwater</i>
		<40 mg/l CaCO ₃		Lunak / <i>softwater</i>
9	Kesadahan	<50 mg/l CaCO ₃	Peavy et al, 1985	Soft
		50-150 mg/l CaCO ₃		Moderately hard
		150-300 mg/l CaCO ₃		Hard / sadah
		>300 mg/l CaCO ₃		Very hard
10	Ortofosfat (PO ₄ -P)	0.015 mg/l	PP 22/2021	
11	TOM	<15 mg/l	Boyd (1990)	

Tabel 8. Monitoring Perairan Teluk Ambon Dalam

No	Parameter	Satuan	Titik sampling		
			1	2	3
1	Suhu	°C	27.3	27.2	27.2
2	Salinitas	ppt	33.5	29	31

No	Parameter	Satuan	Titik sampling		
			1	2	3
3	pH	-	8.25	8.29	8.29
4	DO	mg/l	5.7	5.8	5.5
5	Nitrit (NO ₂)	mg/l	0.003	0.002	0.005
6	TAN (NH ₃ -N)	mg/l	<0.045	<0.045	<0.045
7	Amonia (NH ₃)	mg/l	-	-	-
8	Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	<0.050	<0.050	<0.050
9	Ortofosfat (PO ₄)	mg/l	<0.050	<0.050	<0.050
10	Kesadahan	mg/l	-	-	-
11	Alkalinitas	mg/l	-	-	-
12	Kekeruhan	NTU	-	-	-
13	TOM	mg/l	-	-	-
14	Total bakteri	kol/ml	1.7x10 ¹¹	1.02x10 ⁹	TBUD
15	Total Vibrio	kol/ml	10 ³	7x10 ²	10 ³
16	Dominasi plankton	sel/ml	395		
17	Dominasi	-	<i>Coscinodiscus sp.</i>		

Pelayanan dan Pengujian Sampel

No.	Jenis Sampel	Jenis Pengujian	Internal	Eksternal	Jumlah
1	Ikan	Mikrobiologi	4	0	4
		Virus	1	0	1
2	Air	Kualitas Air	10	15	25
Total			15	15	30

Surveilans dan Pengujian AMR

Jumlah Sampel			Lokasi Pengambilan
Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	
17	0	17	-

Capaian target

Capaian target sampai dengan bulan September 2025 yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laboratorium Yang Memenuhi Standar Teknis (Unit)	Laboratorium terstandar	1 lab	0	0%
	Laporan bulanan	12 laporan	9	75%
	Laporan tahunan	1 laporan	0	0%
Jumlah Sampel yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BPBL Ambon (Sampel)	Jumlah pengujian sampel	309 sampel	528	171%
	Jumlah Pengujian AMR	17 sampel	17	100%

PNBP

No	Tanggal	Parameter Pengujian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	01	Absorbansi	350.000	10 sampel air
		salinitas	6.000	1 sampel air
		DO	40.000	1 sampel air
		Nitrit dan nitrat	150.000	1 sampel air
		Ammonia	60.000	1 sampel air
		pH	15.000	1 sampel air
2	03	salinitas	6.000	1 sampel air

No	Tanggal	Parameter Pengujian	Jumlah (Rp)	Keterangan
		DO	40.000	1 sampel air
		Nitrit dan nitrat	150.000	1 sampel air
		Ammonia	60.000	1 sampel air
		pH	15.000	1 sampel air
	04	salinitas	6.000	1 sampel air
		DO	40.000	1 sampel air
		Nitrit dan nitrat	150.000	1 sampel air
		Ammonia	60.000	1 sampel air
		pH	15.000	1 sampel air
	08	Salinitas	12.000	2 sampel air
		Alkalinitas	80.000	2 sampel air
		Kesadahan	50.000	2 sampel air
		Nitrat dan nitrit	300.000	2 sampel air
		Ammonia	120.000	2 sampel air
		Ortofosfat	100.000	2 sampel air
Total			1.855.000	

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah tingkat realisasi (pencapaian nyata) dari tolok ukur spesifik yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan.

Tabel 9. Capaian IKU Pengujian Sampel Keskianling

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN III			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Persentase Terhadap Target Tahunan (%)
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	309	119	528	443 %	170 %

Capaian IKU Pengujian sampel Keskianling yang dilaksanakan satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 119 sampel sehingga target capaian kinerja untuk IKU ini telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB IV

KESIMPULAN

Capain Persentase Pengujian sampel Kesehatan ikan dan lingkungan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 120% (Nilai Maksimal pada aplikasi Kinerjaku). Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa Sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang terdiri dari kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler yang telah diujikan sampai dengan bulan september 2025 diuji sebanyak 528 sampel atau tercapai 120%.

Ambon, 7 Oktober 2025

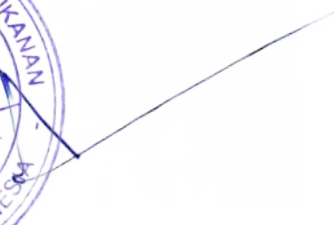
Mengetahui,

Ketua Tim Kerja Laboratorium

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Evri Noerbaeti, M.Si



Manijo, S.St.Pi., M.Pi



DATA DUKUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAMPEL MONITORING PENYAKIT IKAN

DAN AMR YANG DIUJI SATKER BPBL

AMBON (SAMPEL)

Triwulan III_2025



Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan budidaya laut. Dalam rangka pembangunan nasional, sektor perikanan budidaya diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di tingkat global dan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di wilayah timur Indonesia khususnya di Maluku, perikanan budidaya laut merupakan salah satu sub sektor kegiatan KP yang sangat penting. Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BPBL Ambon memiliki peran penting sebagai pusat pengembangan teknologi, produksi benih berkualitas, serta penyediaan pelayanan teknis untuk mendukung keberhasilan usaha budidaya laut di wilayah kerjanya. BPBL Ambon terutama fokus pada komoditas seperti kerapu, kakap putih, ikan bubara, clownfish dan rumput laut.

Kualitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu kesehatan ikan/benih dan kondisi lingkungan budidaya (air). Tanpa pengawasan kualitas yang baik, usaha budidaya bisa mengalami kegagalan karena penyakit ikan atau penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengujian sampel adalah kegiatan yang sangat penting dalam tugas dan fungsi BPBL Ambon.

Aktivitas ini mencakup beberapa hal: Pengujian kesehatan ikan dan benih: Untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan mencegah penyakit serta hama yang bisa merugikan ekonomi. Sampel yang diuji meliputi jaringan ikan, benih, dan induk. Pengujian kualitas air dan lingkungan budidaya: Untuk memantau kondisi fisik, kimia, dan biologis air di sekitar lokasi budidaya. Contohnya seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut (DO), dan kandungan bakteri. Hasil pengujian ini sangat penting untuk memastikan kondisi air sesuai dengan standar mutu yang diperlukan untuk budidaya. Pengujian kualitas sarana produksi: Termasuk pemeriksaan kualitas pakan alami, seperti fitoplankton, serta alat bantu produksi lainnya yang digunakan.

AMR atau Antimicrobial Resistance adalah kondisi di mana mikroorganisme (seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit) tidak lagi merespons obat antimikroba (seperti antibiotik) yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat global.

Pengakuan bahwa resistensi tidak hanya berkembang di manusia, tetapi juga di hewan dan lingkungan. Akuakultur, menjadi salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap penyebaran AMR. Bakteri resisten dari lingkungan budidaya dapat ditularkan ke manusia melalui konsumsi produk perikanan atau kontak langsung dengan lingkungan perairan. Oleh karena itu, AMR harus ditangani dalam kerangka *One Health*, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Sektor akuakultur termasuk di wilayah kerja BPBL Ambon terus berkembang dan semakin intensif. Peningkatan kapasitas produksi budidaya menyebabkan peningkatan kepadatan ikan dalam wadah budidaya (kolam, keramba, dll.) seringkali disertai dengan peningkatan risiko wabah penyakit.

- Penyebab AMR: Untuk mengontrol penyakit bakteri, para pembudidaya terkadang menggunakan antibiotik secara berlebihan (*overuse*), tidak tepat (*misuse*), atau tanpa resep/diagnosis yang benar.
- Seleksi Alami: Penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini menciptakan tekanan seleksi yang memungkinkan bakteri yang resisten untuk bertahan hidup dan berkembang biak.
- Pelepasan ke Lingkungan: Sisa pakan yang mengandung obat, serta feses ikan yang mengandung antibiotik yang tidak terserap, akan terlepas ke perairan. Lingkungan akuatik (air dan sedimen) kemudian menjadi "tempat penampungan" dan "titik panas genetik" (*genetic hotspots*) di mana gen resistensi antibiotik (ARG) dapat menyebar secara horizontal ke berbagai jenis bakteri, termasuk patogen ikan dan manusia.

1.2. Tujuan Kegiatan

Pengujian sampel AMR merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon untuk memastikan biosekuriti (keamanan hayati) yang kuat, mendukung produksi perikanan budidaya yang aman dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada upaya global untuk melawan krisis resistensi antimikroba di bawah kerangka One Health.

BAB II

TARGET KINERJA DAN RENCANA AKSI

2.1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian kinerja yang harus diwujudkan atau dicapai oleh individu, tim, atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, target kinerja berfungsi sebagai sasaran terukur yang menjabarkan tujuan besar menjadi hasil kerja yang konkret, spesifik, dan dapat dievaluasi.

Target kinerja yang baik biasanya memenuhi kriteria SMART:

- Specific (Spesifik)
- Measurable (Terukur)
- Achievable (Dapat Dicapai)
- Relevant (Relevan)
- Time-bound (Terikat Waktu)

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Pengujian Sampel AMR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17	4	8	11	17

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kinerja (RAK atau Renaksi) adalah dokumen perencanaan operasional yang merinci langkah-langkah, tahapan, atau kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan secara periodik (biasanya triwulanan atau bulanan) untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK).

- Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja: RAK disusun segera setelah penetapan Perjanjian Kinerja (PK)—dokumen yang memuat komitmen pencapaian kinerja tahunan antara atasan dan bawahan.

- Penjabaran yang Detil, Sementara PK hanya memuat sasaran, indikator, dan target tahunan, RAK menguraikannya menjadi langkah-langkah *operasional* yang terukur dari waktu ke waktu.
- Pedoman Pelaksanaan, RAK menjadi pedoman utama bagi pelaksana di unit kerja untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai anggaran dan waktu yang ditetapkan.

Tabel 2. Rencana Aksi IKU Pengujian Sampel AMR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Tahunan	Target s.d Triwulan			
					I	II	III	IV
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	Dilakukan pengujian sampel AMR berdasarkan jenis ikan atau komoditas serta lokasi yang telah ditentukan	15.538.000	17	4	8	11	17

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Evaluasi Rencana Aksi

Pengambilan sampel AMR dilakukan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Komoditas yang menjadi target adalah ikan kakap putih, ikan bubara dan ikan kerapu. untuk mendapatkan 3 (tiga) jenis bakteri yaitu *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio vulnificus*. Hasil pengujian memperlihatkan diperolehnya 3 (tiga) isolat *Vibrio alginolyticus* pada ikan kakap putih dan 1 (satu) isolat *Vibrio alginolyticus* pada ikan bubara atau Kuwe, yang kemudian dilanjutkan dengan uji kepekaan antibiotik (AST).

Hasil pengujian AST menunjukkan sampel yang diujikan menunjukkan hasil negative. Berikut adalah data yang diperoleh :

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Bakteri

No.	Tanggal	Jenis bakteri	Frekuensi (sampel)	Ikan yang terinfeksi/ukuran	Keterangan
1.	04 Sep 25	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Kakap putih (10 cm)	Pokdakan Kepiting Jaya (Wagito)
2.	04 Sep 25	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Kakap putih (10 cm)	Pokdakan Kepiting Jaya (Kaimudin)
3.	04 Sep 25	<i>Vibrio vulnificus</i>	1	Ikan Bubara (200 gr)	Pokdakan Alam Nyata
4.	04 Sep 25	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	1	Kakap putih (300 gr)	Pokdakan Indah Jaya

Tabel 4. Hasil Pengujian AST

No	Komoditas	Target Sampel	Realisasi	Target Bakteri	Hasil identifikasi		Hasil Uji AST	Lokasi sampling
					positif	negatif		
1	Kerapu	-	-	<i>Vibrio alginolyticus</i>	0	0	-	Kab. Maluku Tengah
2	Kakap Putih	1	3	<i>Vibrio alginolyticus</i>	0	3	-	Kab. Maluku Tengah
3	Ikan Kuwe	1	1	<i>Vibrio alginolyticus</i>	0	1	-	Kab. Maluku Tengah

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah tingkat realisasi (pencapaian nyata) dari tolok ukur spesifik yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan.

Tabel 5. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN III			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Persentase Terhadap Target Tahunan (%)
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17	11	17	154,54 %	100 %

Capaian IKU Pengujian sampel AMR yang dilaksanakan satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 17 sampel atau 100%, sehingga target capaian kinerja untuk IKU ini telah mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB IV

KESIMPULAN

Capain Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR)/Surveilans Antimicrobial Use (AMU) yang telah diujikan sampai dengan bulan september 2025 diuji sebanyak 17 sampel atau tercapai 100,00%.

Ambon, 2 Oktober 2025

Mengetahui,

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi



DATA DUKUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIBIT RUMPUT LAUT KULTUR JARINGAN

YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT

SATKER BPBL AMBON (KG)

Triwulan III_2025



Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bantuan bibit rumput laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan digagas sebagai bagian dari strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama dalam budidaya rumput laut adalah ketersediaan bibit yang berkualitas dan berkesinambungan. Kebijakan ini diarahkan untuk menyediakan bibit unggul di kawasan pengembangan budidaya rumput laut sehingga dapat meningkatkan produksi serta pendapatan para pembudidaya rumput laut. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pembudidaya dapat memperoleh bibit yang cepat, mudah, dan terjangkau sehingga biaya pengadaan bibit dari luar daerah dapat diminimalisir. Selain itu, bantuan ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan para pembudidaya dalam usaha budidaya rumput laut, supaya program bantuan dapat berjalan efektif dan efisien.

Secara teknis, KKP memberikan paket bantuan bibit rumput laut berbasis kultur jaringan yang memiliki keunggulan seperti laju pertumbuhan lebih baik, kandungan karaginan lebih tinggi, dan tingkat adaptasi yang baik terhadap perubahan lingkungan perairan budidaya. Bantuan ini tidak hanya menyediakan bibit, tetapi juga sarana dan prasarana seperti tali bentang, pelampung, dan pemberat beton untuk membangun kebun bibit. Dampak yang diharapkan antara lain tersedianya kebun bibit unggul secara berkelanjutan, peningkatan pendapatan pembibit rumput laut, penyerapan tenaga kerja, serta pembangunan unit kebun bibit di lokasi-lokasi strategis.

Faktor masalah yang melatarbelakangi kebutuhan bibit berkualitas dalam budidaya, termasuk rumput laut, antara lain adalah:

- Kualitas bibit yang rendah berdampak pada pertumbuhan rumput laut yang lambat, kerdil, dan hasil panen yang terbatas. Bibit yang berasal dari varietas yang tidak murni, bercampur dengan bibit lain, atau membawa penyakit dapat menurunkan produktivitas budidaya.
- Ketersediaan bibit unggul yang terbatas menyebabkan pembudidaya kesulitan memperoleh bibit berkualitas yang sesuai kebutuhan, sehingga sering menggunakan bibit seadanya yang beresiko gagal tumbuh atau hasilnya kurang optimal.

- Faktor lingkungan tempat tumbuh bibit seperti kesuburan perairan, salinitas, pH dan suhu juga mempengaruhi mutu bibit, sehingga bila kondisi lingkungan kurang ideal, mutu bibit akan menurun.
- Masih terbatasnya sentra bibit rumput laut yang andal dalam menjamin ketersediaan bibit rumput laut sepanjang waktu serta terbatasnya penggunaan bibit unggul bermutu di kalangan pembudidaya rumput laut yang menyebabkan kebutuhan terhadap bibit berkualitas tinggi belum terpenuhi secara menyeluruh.
- Bibit yang tidak sehat atau tercemar hama dan penyakit akan menurunkan hasil produksi dan daya tahan tanaman.

Oleh karena itu, kebutuhan bibit berkualitas sangat penting untuk menjamin pertumbuhan optimal, peningkatan hasil produksi, serta keberhasilan budidaya rumput laut dan komoditas lainnya

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjamin kualitas bibit rumput laut meliputi beberapa hal penting. Pemerintah mengembangkan teknologi kultur jaringan sebagai metode utama dalam penyediaan bibit rumput laut berkualitas unggul. Bibit yang dihasilkan melalui kultur jaringan berasal dari induk yang unggul dan diproses secara aseptik untuk menjamin kemurnian, kekuatan tumbuh, dan ketahanan terhadap penyakit.

KKP juga membangun dan mengoptimalkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi pusat produksi bibit kultur jaringan. Salah satunya adalah Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Kebijakan ini juga melibatkan upaya kolaborasi dengan lembaga riset seperti Biotrop guna memastikan bibit yang dihasilkan sesuai standar kualitas dan terus menerus diperbaiki. Selain itu, KKP menyalurkan bantuan bibit kultur jaringan kepada kelompok pembudidaya di sentra rumput laut seperti di Maluku Tenggara, Kota Tual, dan beberapa sentra produksi rumput laut di timur Indonesia.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan strategis dari program bantuan bibit rumput laut yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencakup beberapa poin utama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah bibit rumput laut melalui pengembangan laboratorium kultur jaringan serta kebun bibit rumput laut, dengan harapan dapat memproduksi bibit unggul yang

akan meningkatkan produktivitas budidaya rumput laut di tingkat nasional. Kedua, mendukung pengembangan pusat kawasan budidaya dan pembangunan desa rumput laut agar terbentuk kluster pembudidaya yang mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, program ini menyediakan dukungan infrastruktur dan bimbingan teknis dan pelatihan kepada kelompok pembudidaya untuk memperbaiki kapasitas dan pengelolaan usaha budidaya rumput laut. Secara umum, sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan hasil rumput laut dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya, serta mendukung kemajuan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan dan mampu bersaing di level global

BAB II

TARGET KINERJA DAN RENCANA AKSI

2.1. Target Kinerja

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian kinerja yang harus diwujudkan atau dicapai oleh individu, tim, atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Secara sederhana, target kinerja berfungsi sebagai sasaran terukur yang menjabarkan tujuan besar menjadi hasil kerja yang konkret, spesifik, dan dapat dievaluasi.

Target kinerja yang baik biasanya memenuhi kriteria SMART:

- Specific (Spesifik)
- Measurable (Terukur)
- Achievable (Dapat Dicapai)
- Relevant (Relevan)
- Time-bound (Terikat Waktu)

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10124	500	1379	3179	10124

2.2. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kinerja (RAK atau Renaksi) adalah dokumen perencanaan operasional yang merinci langkah-langkah, tahapan, atau kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan secara periodik (biasanya triwulanan atau bulanan) untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK).

- Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja: RAK disusun segera setelah penetapan Perjanjian Kinerja (PK)—dokumen yang memuat komitmen pencapaian kinerja tahunan antara atasan dan bawahan.

- Penjabaran yang Detil, Sementara PK hanya memuat sasaran, indikator, dan target tahunan, RAK menguraikannya menjadi langkah-langkah *operasional* yang terukur dari waktu ke waktu.
- Pedoman Pelaksanaan, RAK menjadi pedoman utama bagi pelaksana di unit kerja untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai anggaran dan waktu yang ditetapkan.

Tabel 2. Rencana Aksi IKU Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Tahunan	Target s.d Triwulan			
					I	II	III	IV
Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	proses produksi bibit rumput laut untuk pemenuhan kebutuhan bibit rumput laut yang didistribusikan pada masyarakat	222.520.000	4 Laporan	1	2	3	4
Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	Pelaksanaan distribusi bantuan bibit rumput laut di wilayah kerja satker BPBL Ambon	222.520.000	10124 Kg	500	1379	3179	10124

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Evaluasi Rencana Aksi

Evaluasi rencana aksi terhadap pelaksanaan bantuan bibit rumput laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan beberapa temuan penting. Bantuan bibit rumput laut kultur jaringan yang didistribusikan ke kelompok pembudidaya di sentra produksi, telah dimanfaatkan dengan baik meskipun belum maksimal. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kematian bibit akibat waktu distribusi yang kurang tepat, terutama jika bertepatan dengan musim penyakit di lokasi penerima bantuan. Namun, bibit kultur jaringan tersebut mampu bertahan melewati musim penyakit dan menjadi stok bibit untuk musim tanam berikutnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bersama penyuluh perikanan dan dinas kelautan dan perikanan daerah terkait. Pelaksanaan kegiatan pendampingan teknis dan pelatihan juga menjadi bagian evaluasi untuk meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya dalam mengoptimalkan penggunaan bibit. Evaluasi mencakup tahap identifikasi calon penerima, penyaluran bantuan, hingga laporan perkembangan produksi bibit yang diterima.

Rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari evaluasi ini mencakup perhatian terhadap waktu distribusi agar tidak bertepatan dengan musim penyakit, serta pengemasan dan pengiriman bibit perlu disesuaikan dengan durasi perjalanan agar bibit tiba dalam keadaan segar dan siap untuk ditanam. Secara keseluruhan, penilaian ini dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk memperbaiki program bantuan bibit rumput laut agar memberikan dampak maksimal bagi para pembudidaya dan mendukung peningkatan produksi rumput laut nasional secara berkelanjutan.

Sasaran dari bantuan Bibit Rumput Laut adalah pembudidaya rumput laut yang berada di kawasan budidaya rumput laut, serta tersalurkannya 10.124 kg bibit rumput laut kepada kelompok pembudidaya penerima bantuan. Target bantuan Bibit Rumput Laut pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon TA. 2025 adalah sebagai berikut,

Tabel 3. Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut BPBL Ambon

No.	UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Target Awal (Kg)	Target s.d Triwulan III (Kg)
1.	BPBL Ambon	10.124	3179

Indikator keberhasilan kegiatan bantuan Bibit Rumput Laut adalah tersalurkannya bantuan sebanyak 10.124 kg bibit rumput laut dengan capaian 100% dari target. Kegiatan Bantuan Bibit Rumput Laut ini diharapkan dapat mendukung jaminan ketersediaan Bibit Rumput Laut pada kawasan budidaya rumput laut secara berkesinambungan khususnya di Provinsi Maluku, dan Maluku Utara.

Realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, bantuan bibit rumput laut mencapai 3.180 Kg dari target tahunan 10.124 Kg. Bantuan ini didistribusikan di Kota Tual, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Persyaratan penerima bantuan pemerintah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 297 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah bibit rumput laut tahun 2025, Penerima bantuan pemerintah berupa Bibit Rumput Laut kepada kelompok prioritas KKP yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Kelompok Pembudidaya
2. Kelompok masyarakat hukum adat
3. Kelompok swadaya masyarakat
4. Lembaga pendidikan, dan
5. Lembaga keagamaan
6. Koperasi

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dijelaskan bahwa Kelompok pembudidaya ikan selanjutnya disebut pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir. Kelembagaan pelaku utama perikanan memiliki karakteristik sebagai berikut,

- Memiliki jumlah anggota kelompok 10 – 25 orang;
- Pelaku utama yang berada didalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok;

- Memiliki tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan;
- Memiliki kesamaan – kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi dan Bahasa;
- Bersifat informal;
- Memiliki saling ketergantungan antar individu;
- Mandiri dan partisipatif;
- Memiliki aturan atau norma yang disepakati bersama; dan
- Memiliki administrasi yang rapih.

Kelembagaan pelaku utama perikanan yang mandiri dapat terjadi karena adanya pengikat yang kuat diantara mereka. Unsur pengikat tersebut adalah sebagai berikut :

- Adanya kepentingan yang sama;
- Adanya motivasi untuk berkembang diantara mereka;
- Adanya saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab dan saling mempercayai;
- Adanya sentra/kluster/zona yang menjadi tanggungjawab bersama;
- Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas;
- Adanya pengelolaan administrasi, sarana prasarana dan keuangan secara bersama;
- Adanya kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi sebagian besar anggotanya;

Kegiatan bantuan bibit rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2025 mengarah pada kelompok pembudidaya ikan di beberapa kabupaten Kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Adapun lokasi kegiatan bantuan bibit rumput laut tersaji pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Sebaran Bantuan Bibit Rumput Laut Provinsi Maluku TA. 2025

No	Provinsi	Kabupate/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	Keterangan
1.	Maluku	Kota Tual	5 Kelompok	Telah Terealisasi

Tabel 5. Sebaran Bantuan Bibit Rumput Laut Provinsi Maluku Utara TA. 2025

No	Provinsi	Kabupate/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	Keterangan
1.	Maluku Utara	Pulau Morotai	5 Kelompok	Telah Terealisasi
2.	Maluku Utara	Pulau Taliabu	3 Kelompok	Telah Terealisasi

Data hasil kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok pembudidaya rumput laut di Kabupaten Pulau Morotai tersaji pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Pembudidaya Rumput Laut di KabupatenPulau Morotai

No.	Uraian	Analisa data
1.	Potensi wilayah	Data Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyebutkan, potensi lahan perikanan budidaya di Morotai mencapai 7.134,30 hektar. Sementara yang dimanfaatkan baru 570,74 hektar, meliputi budidaya rumput laut 389,84 hektar, budidaya kerapu 34.32 hektar, dan budidaya kerang mutiara 4,21 hektar. Ada juga budidaya sea ranching seluas 316,20 hektar. (Admi Athirah)
2.	Jenis komoditas	Rumput Laut Sakul
3.	Jumlah kelompok pembudidaya	Data kelompok yang diidentifikasi dan Verifikasi Bantuan Bibit Rumput Laut Tahun 2025 terdiri dari 5 Kelompok yakni : 1. Pokdakan Bawal 2. Pokdakan Kakap 3. Pokdakan Pomakirio 4. Pokdakan Tike Laha 5. Pokdakan Tonidora
4.	Kapasitas produksi	Dapat mencapai rata-rata 3 - 5 ton/per tahun
5.	Kegiatan Utama	Kegiatan budidaya rumput laut
6.	Teknologi budidaya	Sistem Tancap
7.	Lokasi	Galo Galo, Kolorai dan Ngele Besar
8.	Wadah budidaya	Budidaya rumput laut menggunakan sistem tancap dengan sarana utama berupa tali
9.	Kepemilikan unit usaha	kelompok
10.	Tahun pendirian/ operasional	Rata rata kelompok dibentuk pada 2024
11.	Persyaratan Administrasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Telah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai • Telah memiliki E Kusuka • Telah memiliki BPJS Kesehatan • Beranggotakan 10 orang setiap kelompoknya • Belum menerima bantuan sejenis yang dibantukan

		• Anggota kelompok bukan aparat desa/penyuluh perikanan/ASN/TNI POLRI • Bersedia mengelola bantuan yang diterima dengan baik dan melaporkan kegiatan budidaya yang dilaksanakan • Bersedia menandatangani BAST Bantuan yang diterima
12.	Persyaratan Teknis Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Sudah pernah melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut • lokasi budi daya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; • memiliki akses yang mudah dijangkau

Kegiatan penyerahan bantuan bibit rumput laut di Kabupaten Pulau Morotai, dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 1897 – 1901/BPBLA/PB.140/IX/2025 tanggal 18 September 2025. Bantuan bibit ditujukan untuk Kelompok pembudidaya Bawal, Kakap, Pomakirio, Tike Laha dan Tonidora. Total bibit rumput laut yang didistribusikan sebanyak 1050 Kg. Bibit rumput laut Sakul yang diberikan merupakan bibit rumput laut yang dibudidayakan di lokasi budidaya rumput laut di Pulau Morotai.

Hasil menunjukan bibit rumput laut pada awal pemeliharaan memiliki tingkat perkembangan thalus yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari munculnya calon calon thalus muda pada rumpun atau tangkai thalus, perkembangan ini didukung oleh kualitas parameter perairan yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut. Hasil pengukuran suhu air berada pada kisaran 28°C – 30°C dengan salinitas 28 – 31 ppt. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Efendi (2003) yang menyatakan bahwa suhu perairan berhubungan dengan kemampuan pemanasan sinar matahari dan diperkuat oleh Hutabarat (2000) yang menyatakan perairan lebih lambat menyerap panas akan tetapi mampu menyimpan panas lebih lama daripada daratan. Suhu hasil pengukuran merupakan suhu optimal untuk budidaya rumput laut.

Selain suhu, salinitas juga memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan rumput laut. Tinggi rendahnya salinitas dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain, tinggi rendahnya curah hujan di suatu kawasan perairan, intensitas cahaya matahari yang

mempengaruhi factor penguapan dan banyaknya jumlah air tawar yang masuk dalam perairan (aliran sungai).

Salah satu kendala pada kegiatan budidaya rumput laut adalah adanya serangan ice ice, tumbuhnya lumut pada rumpun rumput laut menyebabkan banyaknya kematian bibit di tambah dengan tata kelola budidaya yang kurang baik.

Ice ice adalah penyakit yang banyak menyerang tanaman rumput laut jenis *Kappaphycus alvarezii*. Pertama kali dilaporkan pada tahun 1974 di Philipina, ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak pada sebagian tallus yang lama-kelamaan kehilangan warna dan berangsur-angsur menjadi putih dan mudah terputus. Penyakit ice-ice timbul karena adanya mikroba yang menyerang tanaman rumput laut yang lemah (Sudjiharno 2001). Lebih lanjut Anonim (2001), menyatakan bahwa keberadaan orthophosphate (P_2O_5) yang dibutuhkan dalam proses asimilasi rumput laut yang tidak mencukupi diduga sebagai salah satu penyebab atas timbulnya penyakit ice-ice. Largo et al. (1999) menyatakan bahwa penyakit ice-ice pada rumput laut disebabkan oleh bakteri *Vibrio* sp. dimana sel-sel yang terinfeksi oleh bakteri ini mampu berkembang hanya dalam waktu 1-2 jam pada tallus yang sudah terinfeksi dan memerlukan waktu 24 jam bagi thallus yang masih sehat.

Penyakit ice-ice sering kali terjadi di daerah-daerah dengan kecerahan tinggi, dengan gejala timbulnya bintik-bintik/bercak-bercak pada sebagian tallus, namun lama-kelamaan akan menyebabkan kehilangan warna sampai menjadi putih dan mudah terputus. Penyakit ini menyerang dapat *Eucheuma* spp. terutama disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan (arus, suhu, kecerahan, dan lain lain.) di lokasi budidaya dan berjalan dalam waktu yang cukup lama. Cara pencegahan dari penyakit ini adalah dengan memonitor adanya perubahan-perubahan lingkungan, terutama pada saat terjadinya perubahan lingkungan. Disamping itu dilakukan penurunan posisi tanaman lebih dalam untuk mengurangi penetrasi cahaya sinar matahari. (Anonim 2006).

Hasil monitoring evaluasi kegiatan bantuan pada minggu pertama bulan Oktober bibit rumput laut hasil bantuan mengalami sedikit penurunan jumlah akibat serangan penyakit ice – ice dan lumut, hal ini juga didukung dengan parameter perairan yang berfluktuasi akibat proses peralihan musim. Tindak lanjut kegiatan yang disarankan oleh tim kepada pembudidaya adalah meningkatkan pengawasan dan tata kelola budidaya rumput laut, memindahkan bibit rumput laut yang tersisa ke perairan yang relative aman (pemindahan lokasi budidaya), mengatur jarak

rumpun pada tali utama, dan mengatur kedalaman yang tepat agar sinar matahari masih menjangkau area budidaya.



Gambar 1. Pembudidaya RL di Pulau Galo Galo, Pulau Morotai

Data hasil kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok pembudidaya rumput laut di Kabupaten Pulau Taliabu tersaji pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Data Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Pembudidaya Rumput Laut di Kabupaten Pulau Taliabu

No.	Uraian	Analisa data
1.	Potensi wilayah	Rumput laut dan pembesaran ikan di keramba jaring apung (KJA) memang menjadi dua sektor andalan Taliabu untuk sektor budidaya. Budidaya ikan keramba sendiri berupa kerapu dan lobster. Ada juga budi daya abalone dengan produksi mencapai 3,9 ton. Di tahun 2016 lalu total produksi seluruh sektor budidaya ini mencapai 414,6 ton. Untuk budidaya rumput laut, sentranya di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Taliabu Barat dan Lede. Total produksinya mencapai 408 ton di tahun 2016.
2.	Jenis komoditas	Rumput Laut E cottoni
3.	Jumlah kelompok pembudidaya	Data kelompok yang diidentifikasi dan Verifikasi Bantuan Bibit Rumput Laut Tahun 2025 terdiri dari 3 Kelompok yakni : 1. Pokdakan Cottoni Coklat 2. Pokdakan Mekar Jaya 3. Pokdakan Ngegele Mandiri
4.	Kapasitas produksi	Dapat mencapai rata-rata 3 - 5 ton/per tahun
5.	Kegiatan Utama	Kegiatan budidaya rumput laut
6.	Teknologi budidaya	Sistem Longline
7.	Lokasi	Onemay, Nggele
8.	Wadah budidaya	Budidaya rumput laut menggunakan sistem longline dengan sarana utama berupa tali

9.	Kepemilikan unit usaha	kelompok
10.	Tahun pendirian/ operasional	Rata rata kelompok dibentuk pada 2024
11.	Persyaratan Administrasi Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Telah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai • Telah memiliki E Kusuka • Telah memiliki BPJS Kesehatan • Beranggotakan 10 orang setiap kelompoknya • Belum menerima bantuan sejenis yang dibantukan • Anggota kelompok bukan aparat desa/penyuluh perikanan/ASN/TNI POLRI • Bersedia mengelola bantuan yang diterima dengan baik dan melaporkan kegiatan budidaya yang dilaksanakan • Bersedia menandatangani BAST Bantuan yang diterima
12.	Persyaratan Teknis Calon Kelompok Penerima Bantuan	• Sudah pernah melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut • lokasi budi daya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; • memiliki akses yang mudah dijangkau

Kegiatan penyerahan bantuan bibit rumput laut di Kabupaten Pulau Taliabu, dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 1983 – 1985/BPBLA/PB.140/IX/2025. Bantuan bibit ditujukan untuk Tiga (3) Kelompok pembudidaya. Total bibit rumput laut yang didistribusikan sebanyak 630 Kg. Bibit rumput laut *Euchema cottoni* yang diberikan merupakan bibit rumput laut yang dibudidayakan kelompok pembudidaya di sekitar lokasi Taliabu dan merupakan binaan Dinas KP dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Hasil menunjukan bibit rumput laut pada awal pemeliharaan memiliki tingkat perkembangan thalus yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari munculnya calon calon thalus muda pada rumpun atau tangkai thalus, perkembangan ini didukung oleh kualitas parameter perairan yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut.

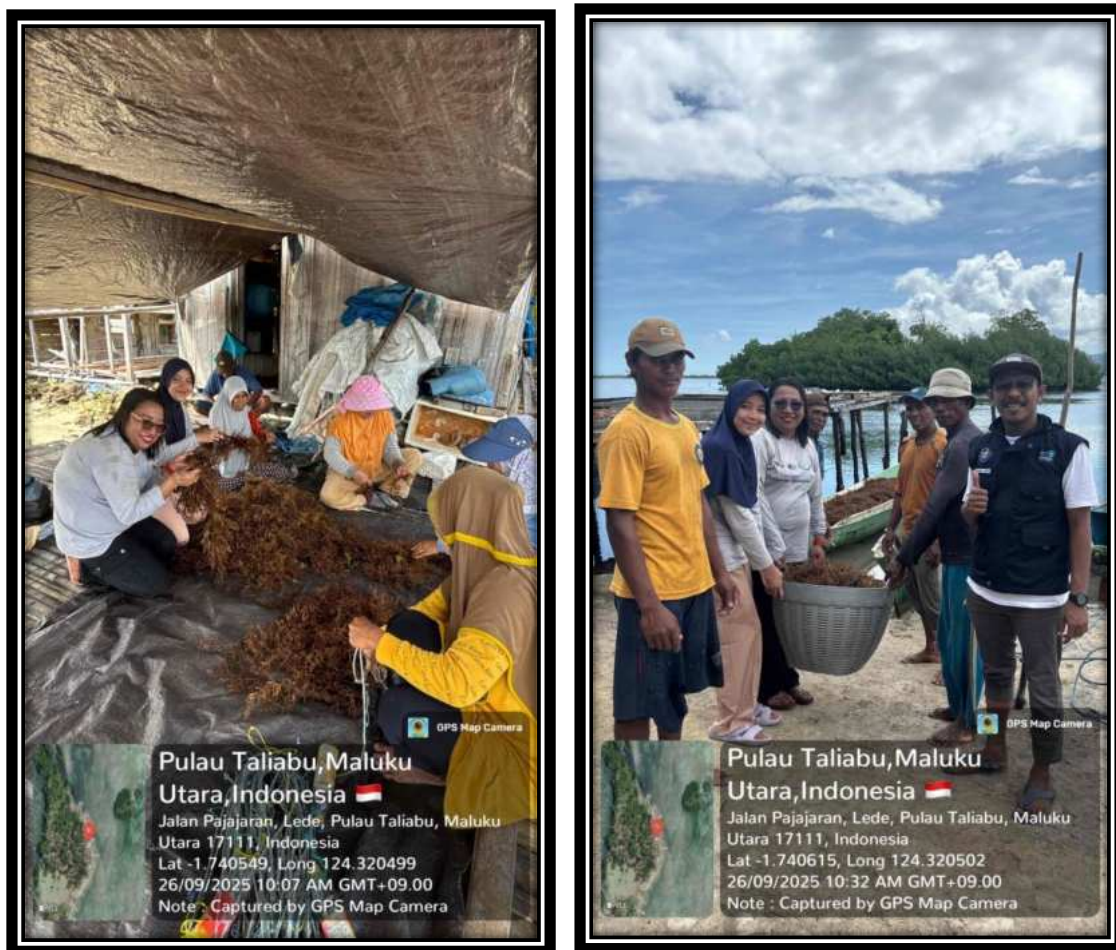
Hasil monitoring evaluasi kegiatan bantuan pada bulan september bibit rumput laut hasil bantuan, berdasarkan informasi Dinas Kelautan dan Perikanan Pulau Taliabu, bahwa perkembangan bibit rumput laut kultur jaringan dari BPBL Ambon menunjukan hasil yang

signifikan. Perkembangan thalus yang begitu cepat dan memiliki karakter thalus yang baik dengan pertumbuhan cabang cabang yang merata. Tingkat kematian bibit juga relative menurun dengan intensitas serangan yang rendah. Pengelolaan budidaya menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak budidaya rumput laut. Pemeliharaan dan pemantauan secara berkala menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh setiap pembudidaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pembudidaya di pulau Limbo Kabupaten Pulau Taliabu bahwa perkembangan rumput laut kultur menunjukan hasil yang bagus, hampir sebagian besar bibit rumput laut yang digunakan oleh pembudidaya di taliabu adaalah bibit rumput laut kultur jaringan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Menurut pembudidaya bibit rumput laut relative tahan terhadap serangan penyakit dan pertumbuhan thalus yang cepat. Kapasitas produksi saat ini setiap pembudidaya bisa mencapai 7 ton – 10 ton. Dalam hal pengembangan kelembagaan kelompok pembudidaya di Kabupaten Pulau Taliabu juga telah mengalami perkembangan. Hal ini merupakan hasil dari pembinaan yang berkesinambungan dari Dinas KP setempat dan Penyuluh Perikanan. Dalam hal pengarusutmaan gender juga telah banyak melibatkan pembudidaya Wanita dalam kegiatan pokok budidaya. Pembudidaya Wanita memiliki peranan yang sama untuk turut serta menyukseskan kegiatan budidaya yang dilaksanakan seperti :

- Pemilihan indukan bibit rumput laut
- Pengikatan bibit
- Pemeliharaan bibit
- Panen

Secara umum kegiatan budidaya rumput laut di Kabupaten Pulau Taliabu, tidak banyak mengalami kendala pada awal pemeliharaan. Kegiatan rumput laut di Kabupaten Pulau Taliabu pada bulan Mei dan Juni difokuskan untuk kegiatan perbanyakan bibit karena ketersediaan bibit menjadi factor pembatas yang cukup signifikan. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan, (Biotrop, 2014).



Gambar 2. Pembudidaya RL di Onemay, Pulau Taliabu

3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan adalah tingkat realisasi (pencapaian nyata) dari tolok ukur spesifik yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan.

Tabel 8. Capaian IKU Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	TARGET s.d TRIWULAN III			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Persentase Terhadap Target Tahunan (%)
Terkelolanya sistem perikanan budi daya rumput laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	10124	3179	3180	100,03 %	31,41 %

Capaian IKU Bibit rumput laut yang didistribusikan kepada masyarakat yang dilaksanakan satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 3180 Kg sampel atau 100,03%, target capaian kinerja untuk IKU ini terhadap target tahunan baru mencapai 31,41%.

BAB IV

KESIMPULAN

Kegiatan bantuan prioritas bibit rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2025 telah dilaksanakan, disalurkan di tiga Kabupaten Kota yakni Kota Tual sebanyak 1500 Kg, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebanyak 630 Kg dan Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 1050 Kg. Total bantuan yang telah terealisasi sebanyak **3180 Kg** atau **100,03%** terhadap target triwulan III dan 31,41% terhadap target tahunan. Penetapan target bantuan bibit rumput laut belum mengalami perubahan walaupun adanya efisiensi anggaran. Bantuan yang telah disalurkan akan tetap dipantau perkembangannya dengan melibatkan peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan Penyuluh Perikanan. Perkembangan budidaya rumput laut di Maluku dan Maluku Utara menjadi salah satu potensi besar yang harus dijaga dan dikelola dengan regulasi yang tepat.

Ambon, 7 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Kerja Produksi



Immanuel G Pattipeilohy, M.Si

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.6685/DJPB.1/TU.140/X/2025 7 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan III Tahun 2025

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 Juni 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2025 (Triwulan III Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan III Tahun 2025 lingkup DJPB sebesar 97,91% (tuntas 328 dari 335 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran II.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : B.6685/DJPB.1/TU.140/X/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

Daftar Penerima Surat

1. Direktur Ikan Air Tawar
2. Direktur Ikan Air Payau
3. Direktur Ikan Air Laut
4. Direktur Rumput Laut
5. Direktur Prasarana dan Sarana
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
8. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
17. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
18. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : B.6685/DJPB.1/TU.140/X/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00%
2	Direktorat Rumput Laut	89,19%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	94,59%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	97,91%
6	BBPBAP Jepara	100,00%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	100,00%
11	BPBAT Sungai Gelam	97,91%
12	BPBAT Mandiangin	97,91%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	97,91%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR : 3699.21.07/ITJ/PL.420/VII/2025

Pada hari ini, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, telah dilakukan pembahasan dan penilaian atas data dukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan auditi: BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

Dihadiri oleh:

Tim Auditi:

1. Nama: Manijo, S.St.Pi.
NIP: 198504292008011005
Jabatan : Kepala BPBL Ambon

Tim Pengawasan:

1. Nama: Ir. Nur Arif Azizi, M.M
NIP: 196008211986031004
Jabatan : Pengendali Mutu/Supervisor
2. Nama: Evin Nurviani, S.Pi, M.Ak, QIA
NIP: 197608112003122002
Jabatan : Pengendali Teknis
3. Nama: Bambang Kusyudhono, S.E., MM, QIA
NIP: 197809262005021001
Jabatan : Ketua Tim
4. Nama: Deny Tri Prastyo, S.Pi
NIP: 199410252020121002
Jabatan : Anggota Tim
5. Nama: Athifah Hanani, S.Pi
NIP: 199602242019022005
Jabatan : Anggota Tim

Dalam proses pemantauan/penilaian terhadap bukti pendukung tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP nomor: T.247/ITJ.3/HP.550/IV/2025, perihal Pemantauan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024-2025 pada BPBL Ambon sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.320/ITJ.3/KP.440/V/2025, diperoleh hasil sebagaimana tertuang pada lampiran berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini bersifat penetapan sementara dan akan dilakukan validasi dan penetapan oleh Inspektur atas nama Inspektur Jenderal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan pada tanggal:
21 Juli 2025

Pihak yang menyepakati,

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala BPBL Ambon

Manijo, S.St.Pi.
NIP. 198504292008011005

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor

Ir. Nur Arif Azizi, M.M
NIP. 196008211986031004

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

LAMPIRAN BATL

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penatausahaan PNBPN Tidak Tertib	02.8.73	1.	Direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya agar menginstruksikan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, agar: a. Memerintahkan Bendahara Penerimaan supaya melakukan sinkronisasi Laporan PNBPN dengan OMSPAN, Billing Simponi, Surat Perintah Membayar (SPM), Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan setiap bulan	0.00	TL 9 Mei 2025 Surat Dirjen PB Nomor: B.1461/DJPB/HP.510/V/2025, tanggal 2 Mei 2025 perihal Instruksi Agar dilengkapi dengan surat/memo/nodin dari Kepala BPBL Ambon ke Bendahara Penerimaan TL 22 Mei 2025 Surat Perintah Kepala BPBL Ambon No B.885/BPBLA/HP.510/V/2025, tanggal 5 Mei 2025 kepada Bendahara Penerimaan	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penatausahaan PNBP Tidak Tertib	02.8.73	2.	Direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya agar menginstruksikan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, agar: Memerintahkan Tim Pengelola PNBP supaya lebih cermat dalam melakukan pencatatan mutasi keluar (terjual) pada kartu produksi dan memperbaiki laporan kartu produksi dengan melakukan sinkronisasi antara kartu produksi dengan laporan Bendahara Penerima	0.00	TL 9 Mei 2025 Surat Dirjen PB No B.1460/DJPB/HP.510/V/2025, tanggal 2 Mei 2025 Agar dilengkapi dengan : 1. surat/memo/nodin Kepala BPBL Ambon kepada Tim Pengelola PNBP 2. Dokumen perbaikan laporan kartu produksi dengan melakukan sinkronisasi antara kartu produksi dengan laporan Bendahara Penerima TL 26 Mei 2025 1. Surat Perintah Kepala BPBL Ambon No B.886/BPBLA/HP.510/V/2025, tanggal 5 Mei 2025 2. Perbaikan kartu produksi	0.00	TUNTAS
Penatausahaan PNBP Tidak Tertib	02.8.73	3.	Direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya agar menginstruksikan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, agar Melengkapi tanda terima/kwitansi pembayaran atas setiap transaksi penjualan ikan sesuai SOP	0.00	TL 9 MEI 2025 SURAT DIRJEN PB NOMOR: B.1460/DJPB/HP.510/V/2025, TANGGAL 2 MEI 2025 PERIHAL INSTRUKSI AGAR DILENGKAPI DENGAN TANDA TERIMA/KWITANSI YG BELUM ADA ATAS TRANSAKSI PENJUALAN IKAN SESUAI SOP TL 26 MEI 2025 NOTA PENJUALAN IKAN TAHUN 2024 S.D 2025	0.00	TUNTAS
Pemanfaatan Rumah Negara Belum Sesuai Ketentuan	01.3.34	4.	Kepala BPBL Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang agar Menginstruksikan Bendahara Penerimaan untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Negara kekurangan biaya sewa atas Rumah Negara senilai Rp409.312,00	409,312.00	TL 22 Mei 2025 1. Surat Instruksi Kepala BPBL No B.876/BPBLA/HP.510/V/2025, tanggal 2 Mei 2025 2. NTPN No: D0E0361QVD8BD4TO, tanggal 6 Mei 2025 senilai Rp409.312,00 3. Tanda terima penyetoran selisih kekurangan sewa rumah negara kepada bendahara penerimaan	409,312.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemanfaatan Rumah Negara Belum Sesuai Ketentuan	01.3.34	5.	Kepala BPBL Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang agar Melakukan konsultasi secara tertulis kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya terkait revisi nilai sewa dan masa berlaku izin penghunian pada SIP 24 pegawai BPBL Ambon	0.00	TL 26 Mei 2025 Surat Kepala BPBL Ambon No: B.894/BPBLA/HP.510/V/2025, tanggal 6 Mei 2025 perihal Permohonan Arahan terkait Revisi Nilai Sewa dan Masa Berlaku Izin Penghunian pada SIP Rumah Negara Di Lingkungan BPBL Ambon	0.00	TUNTAS
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Pelayanan Publik Tidak Sesuai Ketentuan	02.8.73	6.	Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya agar menginstruksikan secara tertulis Kepala BPBL Ambon agar memerintahkan Tim Pengelola PNBP dan Tim Pelayanan Publik untuk segera melakukan review dan perbaikan atas SOP pelayanan	0.00	TL 9 MEI 2025 SURAT DIRJEN PB NOMOR: B.1461/DJPB/HP.510/V/2025, TANGGAL 2 MEI 2025 PERIHAL INSTRUKSI AGAR DILENGKAPI DENGAN: 1. SURAT/MEMO/NODIN DARI KEPALA BPBL AMBON KE TIM PENGELOLA PNBP DAN TIM PELAYANAN PUBLIK 2. REVIU DAN PERBAIKAN SOP PELAYANAN TERKAIT TL 22 MEI 2025 1. SURAT PERINTAH KEPALA BPBL AMBON NO: B.887/BPBLA/HP.510/V/2025, TAGNGGAL 5 MEI 2025 KEPADA TIM PENGELOLA PNBP DAN TIM PELAYANAN PUBLIK BPBL AMBON 2. DAFTAR HADIR, UNDANGAN, DAN NOTULEN RAPAT REVIU SERTA PERBAIKAN SOP LAYANAN 3. PERBAIKAN SOP PELAYANAN SAMPEL KAULITAS AIR AGAR DILENGKAPI DENGAN HASIL PERBAIKAN SOP PENGGUNAAN MESS BER-AC UNTUK MASYARAKAT UMUM TL 28 MEI 2025 1. REVISI SOP PENGGUNAAN SARANA PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI 2. REVISI SOP PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP NON TUNAI BAGI PENGGUNAN SARPRAS 3. UNDANGAN, DAFTAR HADIR, DAN NOTULEN RAPAT REVIEW SOP PENGGUNAAN SARANA PRASARANA LINGKUP BPBL AMBON	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Pelayanan Publik Tidak Sesuai Ketentuan	02.8.73	7.	Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya agar menginstruksikan secara tertulis Kepala BPBL Ambon agar memerintahkan Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk melaksanakan pelayanan sampel sesuai dengan SOP yang berlaku	0.00	TL 9 Mei 2025 Surat Dirjen PB Nomor: B.1461/DJPB/HP.510/V/2025, tanggal 2 Mei 2025 perihal Instruksi Agar dilengkapi dengan surat/memo/nodin dari Kepala BPBL Ambon ke Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan TL 22 Mei 2025 Sura Perintaht Kepala BPBL Ambon No: B.888/BPBLA/HP.510/V/2025, tanggal 5 Mei 2025	0.00	TUNTAS

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala BPBL Ambon



Manijo, S.St.Pi.
NIP. 198504292008011005

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor



Ir. Nur Arif Azizi, M.M
NIP. 196008211986031004



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

FORM-10

Nomor : 3699.21.07/ITJ/PL.420/VII/2025
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : Lampiran 2. BATL LHP No. T.247/ITJ.3/HP.550/IV/2025
Hal : Penentuan Status Tindak Lanjut

21 Juli 2025

Yth. Kepala BPBL Ambon
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dengan ini disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menentukan status tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN		
		JUMLAH		NILAI KEUANGAN
		KEJADIAN	SARAN	
A	Temuan			
	1. Awal	3	7	409,312
B	Tindak Lanjut			409,312
	1. Tuntas	3	7	409,312
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	3. RTDD	0	0	0
C	Sisa Temuan			0
	1. Tuntas	0	0	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	4. RTDD	0	0	0

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III

Ir. WAHJUDI POERWANTO, M.Ak
NIP. 19670116 199703 1 002



DATA DUKUNG

Triwulan III_2025

**RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL
DAN POSITIF TERHADAP TOTAL
PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR
PERIKANAN BUDIDAYA**

Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

LAPORAN CAPAIAN RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL DAN POSITIF TERHADAP TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN III TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Secara umum komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima pesan. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai media untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pemberitaan program – program kebijakan perikanan budidaya telah menyusun publikasi dalam bentuk rilis media dan konten infografis dengan mengangkat pemberitaan keberhasilan program perikanan budidaya di masyarakat.

Penyebaran informasi sector perikanan budidaya yang selama ini dilaksanakan adalah bentuk dokumentasi dan peliputan kegiatan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB dalam rangka mensosialisasikan program prioritas perikanan budidaya.

Selain pemberitaan yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pengumpulan pemberitaan sub sector perikanan budidaya juga diperoleh dari informasi atau berita media online yang memuat berita sub sector perikanan budidaya secara umum sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan inputan bagi peningkatan kualitas pemberitaan perikanan budidaya dalam mendukung kemajuan program kebijakan sector perikanan dan kelautan.

II. DESKRIPSI TONE BERITA

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 1. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand (Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi)
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral. (Berita yang hanya melaporkan fakta tanpa ada tendensi opini yang kuat.)
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand (Berita yang memberikan kritik, mencitrakan hal buruk, atau berisi keluhan.)
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

III. RASIO JUMLAH PEMBERITAAN YANG NETRAL DAN POSITIF DIBANDING TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN III 2025

1. Publikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh Bagian Umum Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon agar mampu berperan sebagai media pemberi informasi terhadap kebijakan maupun keberhasilan BPBL Ambon kepada masyarakat pembudidaya;
2. Capaian keberhasilan pencapaian ini didorong oleh gencarnya publikasi kegiatan BPBL Ambon yang bernilai positif dengan dilakukan penyebarluasan konten informasi teknis maupun kegiatan prioritas yang di upload pada kanal media BPBL Ambon sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya pemberitaan positif sub sector perikanan budidaya di masyarakat;
3. Pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan tentang perikanan budidaya yang dimuat di media massa baik lokal maupun nasional;
4. Realisasi rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor Perikanan Budidaya Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100 % dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan memiliki tendensi isu positif.
5. Keberhasilan capaian ini menunjukkan semakin membaiknya pemberitaan perikanan budidaya di berbagai media baik cetak maupun online.

IV. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN JULI 2025

No.	Sub Sektor Pemberitaan	Media Sumber Pemberitaan	Tanggal Terbit	Judul Berita	URL	Penulis Berita	Kategori Isu	Tendensi Isu Pemberitaan	Uraian Singkat Pemberitaan
1.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	27 Juli 2025	Dinas: Ribuan hektare tambak ikan di Karawang akan direvitalisasi	https://www.antaraneews.com/berita/4995501/dinas-ribuan-hektare-tambak-ikan-di-karawang-akan-direvitalisasi	Pewart: M.Ali Khumaini Editor: Biqwanto Situmorang	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan ribuan hektare areal tambak ikan menjadi sasaran dalam program revitalisasi tambak Pantura yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kabid Budidaya Dinas Perikanan Karawang, Nur Ridwan Solihin di Karawang, Minggu menyampaikan melalui program revitalisasi tambak Pantura, Karawang ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan tambak ikan nila salin berkelanjutan.
2.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	24 Juli 2025	KKP: Penerapan CBIB pacu produktivitas budidaya udang di Kebumen	https://www.antaraneews.com/berita/4990641/kkp-penerapan-cbib-pacu-produktivitas-budidaya-udang-di-kebumen	Pewart: Muhammad Harianto Editor: Agus Salim	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) berhasil memacu produktivitas budidaya udang di Kebumen, Jawa Tengah, sebagai bukti efektivitas standar mutu dalam sektor perikanan budidaya. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan modeling tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen terus menunjukkan kinerja positif. Tebe menyebutkan sejak awal tahun sampai Juli 2025, BUBK

									Kebumen berhasil mencatatkan total produksi udang vaname sebanyak 327 ton. "Kami dapat terus melakukan panen udang vaname berkat penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai standar. Hasilnya bisa kita lihat sendiri, produktivitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu,"
3.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	23 Juli 2025	Menteri KP: KNMP-Kopdes Merah Putih diintegrasikan dukung perikanan	https://www.antaraneews.com/berita/4986145/menteri-kp-knmp-kopdes-merah-putih-diintegrasikan-dukung-perikanan	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Adi Lazuardi	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya bakal mengintegrasikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih demi mendukung penyerapan hasil perikanan. "Salah satu program prioritas KKP yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), nantinya akan terintegrasi dengan KDMP," Kopdes Merah Putih berperan sebagai badan usaha yang memberikan layanan seluruh kebutuhan usaha masyarakat di sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan produktifitas usahanya di lokasi KNMP.
4.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	21 Juli 2025	Aquarev bantu petambak kecil tingkatkan produksi udang berkelanjutan	https://www.antaraneews.com/berita/4982005/aquarev-bantu-petambak-kecil-tingkatkan-produksi-udang-berkelanjutan	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Abdul Hakim Muhiddin	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Aquarev mendorong petambak kecil meningkatkan produksi udang secara berkelanjutan melalui pendekatan komunitas, pendampingan teknologi, dan sistem budidaya ramah lingkungan yang memperkuat ketahanan usaha dan kualitas panen. "Indonesia merupakan salah satu negara produsen udang terbesar di dunia,"

									Meski potensinya besar, industri akuakultur Indonesia masih terkendala karena 82 persen tambak udang bersifat tradisional dengan produktivitas rendah dan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius. Minimnya akses teknologi dan pelatihan membuat petambak kecil sulit menerapkan budidaya berkelanjutan, sehingga mendorong berbagai pihak mencari solusi transformasi sistem yang lebih modern dan ramah lingkungan.
5.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	17 Juli 2025	Kemenko Pangan: Lahan idle dapat dioptimalkan untuk perikanan budidaya	https://www.antaraneews.com/berita/4972881/kemenko-pangan-lahan-idle-dapat-dioptimalkan-untuk-perikanan-budidaya	Pewarta: Aji Cakti Editor: Abdul Hakim Muhiddin	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengungkapkan lahan-lahan tidur (<i>idle</i>) dapat dioptimalkan terkait pemanfaatan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Muhamad Mawardi mengatakan, masalah lahan menjadi tantangan utama bagi peningkatan produksi perikanan budidaya. "Saat ini banyak lahan-lahan <i>idle</i> dan itu bisa kita optimalkan terkait pemanfaatan untuk produksi perikanan budidaya," Selain lahan, tantangan kedua dalam produksi perikanan budidaya terkait dengan pakan. Kemenko Pangan mendorong agar pakan untuk perikanan budidaya dapat diproduksi di dalam negeri dengan kualitas baik dan harga

									lebih terjangkau bagi para pelaku budidaya.
6.	Perikanan Budidaya	Antaranews	15 Juli 2025	Pengembangan budi daya perikanan dorong swasembada pangan	<a href="https://www.antaranews.com/berita/4968189/penge-
mbangan-budi-daya-
perikanan-dorong-
swasembada-pangan">https://www.antaranews.com/berita/4968189/penge- mbangan-budi-daya- perikanan-dorong- swasembada-pangan	Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia Editor: Biqwanto Situmorang	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut pengembangan budi daya perikanan di wilayah laut, pesisir, maupun darat dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan tidak hanya soal pemenuhan kebutuhan karbohidrat, tetapi juga harus ditunjang dengan terpenuhinya unsur protein dan lemak. "Jadi kalau kita bicara swasembada pangan, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein. Kita harus memiliki kekuatan di situ,"
7.	Perikanan Budidaya	Antaranews	12 Juli 2025	KKP perkuat tata kelola pupuk bersubsidi sektor perikanan	<a href="https://www.antaranews.com/berita/4962533/kkp-
perkuat-tata-kelola-pupuk-
bersubsidi-sektor-
perikanan">https://www.antaranews.com/berita/4962533/kkp- perkuat-tata-kelola-pupuk- bersubsidi-sektor- perikanan	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: M. Tohamaksun	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi sektor perikanan dengan menjangkau masukan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik demi memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. "Penetapan pupuk bersubsidi tidak hanya diberikan kepada sektor pertanian, tetapi juga menyasar pembudidaya ikan skala kecil," Konsultasi publik itu merupakan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.

									pemerintah menunjukkan keberpihakan melalui Peraturan Presiden Nomor: 6 Tahun 2025 yang menjamin kepastian alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan.
8.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	11 Juli 2025	KKP perkuat koordinasi percepat revitalisasi tambak Pantura Jabar	https://www.antaraneews.com/berita/4959709/kkp-perkuat-koordinasi-percepat-revitalisasi-tambak-pantura-jabar	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Zaenal Abidin	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama empat kabupaten di wilayah tersebut dalam rangka percepatan pelaksanaan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat (Jabar). "Penguatan koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama empat kabupaten yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu," revitalisasi akan mengedepankan sistem budi daya yang ramah lingkungan. Setiap kawasan akan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta area vegetasi sebagai filter alami untuk menjaga ekosistem laut.
9.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	9 Juli 2025	Titiek Soeharto dorong budi daya perikanan terintegrasi teknologi	https://www.antaraneews.com/berita/4953297/titiek-soeharto-dorong-budi-daya-perikanan-terintegrasi-teknologi	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Virna P Setyorini	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	DPR RI mendorong pengembangan budi daya perikanan terintegrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha di sektor tersebut. "Pentingnya digitalisasi budi daya (perikanan) melalui integrasi teknologi seperti ' <i>Internet of Things</i> ', ' <i>artificial intelligence</i> ', dan ' <i>data analytics</i> ',"

									program <i>Smart Fisheries Village</i> (SFV) Garden BRPI, model kolaborasi yang mengintegrasikan hasil riset, teknologi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, yang dijalankan oleh KKP. program tersebut mampu memberikan solusi konkret dalam meningkatkan efisiensi usaha hingga menekan biaya produksi perikanan budi daya.
10.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	7 Juli 2025	Kampung Nelayan Merah Putih tingkatkan kesejahteraan nelayan	https://www.antaraneews.com/berita/4949909/kampung-nelayan-merah-putih-tingkatkan-kesejahteraan-nelayan	Pewartar: Aji Cakti Editor: Adi Lazuardi	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dilakukan melalui berbagai macam cara. Salah satu program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah bagian dari ini," Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaporkannya kepada Presiden. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan satu Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar. Intervensi pemerintah terhadap model pembangunan ini dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.
11.	Perikanan Kelautan	Antaraneews	7 Juli 2025	KKP targetkan produksi	https://www.antaraneews.com/berita/4949809/kkp-	Pewartar: Aji Cakti	Positif	Positif, Berita yang	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan

				perikanan pada 2026 capai 25,84 juta ton	targetkan-produksi-perikanan-pada-2026-capai-2584-juta-ton	Editor: Kelik Dewanto		memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	produksi perikanan pada 2026 mencapai sebesar 25,84 juta ton. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin, mengatakan target tersebut merupakan salah satu target utama KKP dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil <i>trilateral meeting</i> antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), KKP, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah ditetapkan target kinerja utama KKP pada RKP 2026, di antaranya peningkatan luas kawasan konservasi perairan menjadi 30,7 juta hektare (ha). Kemudian, target produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton, lalu nilai tukar nelayan 106-108, nilai ekspor hasil perikanan sebesar 6,7 miliar dolar AS.
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

V. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN AGUSTUS 2025

No.	Sub Sektor Pemberitaan	Media Sumber Pemberitaan	Tanggal Terbit	Judul Berita	URL	Penulis Berita	Kategori Isu	Tendensi Isu Pemberitaan	Uraian Singkat Pemberitaan
1.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	9 Agustus 2025	Badan Karantina Indonesia melepas 15.000 nila di kolong Babel	https://www.antaraneews.com/berita/5026289/badan-karantina-indonesia-melepas-15000-nila-di-kolong-babel	Pewarta: Aprionis Editor: Budisantoso Budiman	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Panggabean melepas bibit ikan nila di kolong atau bekas tambang bijih timah, di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), untuk mendukung ketahanan pangan daerah ini. pelepasan 15.000 bibit ikan nila di kolong kawasan BBG Kota Pangkalpinang yang dikelola Kodim 0413/Bangka menjadi agrowisata ini sangat bagus, untuk mendukung ketahanan pangan dan mengedukasi masyarakat dalam membudidayakan ikan air tawar ini.
2.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	7 Agustus 2025	PJT I tebar 30.000 benih ikan jaga ekosistem Telaga Ngebel Ponorogo	https://www.antaraneews.com/berita/5021861/pjt-i-tebar-30000-benih-ikan-jaga-ekosistem-telaga-ngebel-ponorogo	Pewarta: Willi Irawan Editor: Bambang Sutopo Hadi	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Perum Jasa Tirta I menebar 30.000 benih ikan tawes di Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, sebagai bagian dari konservasi ekosistem dan penguatan ketahanan hayati lokal. "Kegiatan ini merupakan bentuk konkret perusahaan dalam memperkuat ekosistem perairan Telaga Ngebel dan mendukung ketahanan hayati lokal," penebaran benih dilakukan setelah digelar sosialisasi pengendalian karamba ikan kepada masyarakat di Pendopo Kecamatan Ngebel.
3.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	6 Agustus 2025	Menteri KKP sebut manusia pasti akan ke beralih ke pangan biru	https://www.antaraneews.com/berita/5018537/menteri-kkp-sebut-manusia-pasti-akan-ke-beralih-ke-pangan-biru	Pewarta: M Baqir Idrus Alatas Editor: Virna P Setyorini	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung,	Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan manusia pasti akan beralih ke pangan biru (<i>blue food</i>). Pertumbuhan umat manusia

								atau mengapresiasi	secara eksponensial terus terjadi, dan pada 2050 diyakini akan mencapai 9,7 miliar orang. Artinya, menurut Trenggono, daya dukung buminya tidak berubah, tetapi manusianya terus tumbuh secara eksponensial. Karbohidrat semakin lama akan ditinggalkan karena tak terlalu sehat dan penggunaan lahan selalu berkurang, katanya, menegaskan. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan protein hingga 70 persen.
4.	Perikanan Budidaya	AntaraneWS	28 Agustus 2025	KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara	https://www.antaraneWS.com/berita/5070325/kkp-untuk-revitalisasi-tambak-pantura-ajukan-rp26-triliun-ke-danantara	Pewartanya: Muhammad Harianto Editor: Budisantoso Budiman	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare (ha) sebagai pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pengajuan anggaran itu telah dilayangkan secara resmi oleh KKP melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait, sambil menunggu undangan paparan lebih detail. Menurut KKP, pengajuan anggaran ke Danantara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pendanaan memadai

									agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi pembudidaya.
5.	Perikanan Budidaya	AntaraneWS	25 Agustus 2025	Poltek Karawang: Rumput laut bisa jadi penggerak utama ekonomi biru	https://www.antaraneWS.com/berita/5061301/poltek-karawang-rumput-laut-bisa-jadi-penggerak-utama-ekonomi-biru	Pewartanya: M Ali Khumaini Editor: Kelik Dewanto	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Akademisi Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jawa Barat, Catur Pramono Adi menyebutkan komoditas rumput laut bisa menjadi "emas hijau" di laut Nusantara dan menjadi penggerak utama ekonomi biru Indonesia yang dapat menyejahterakan masyarakat pesisir. "Rumput laut bukan sekadar tumbuhan laut yang menempel di karang, ia adalah komoditas strategis yang sangat potensial, bahkan komoditas unggulan yang bisa menembus pasar dunia," sejumlah wilayah pesisir di Indonesia, bentangan tali panjang yang mengapung di laut bukanlah pemandangan asing. Dari kejauhan, mungkin tampak seperti jaring nelayan biasa, tetapi sesungguhnya itu adalah kebun laut tempat rumput laut ditanam. Budi daya Kappaphycus alvarezii di Indonesia umumnya menggunakan tiga metode, yakni lepas dasar, rakit apung, dan long-line. Dari ketiganya, metode long-line kini dianggap paling efektif.
6.	Perikanan Budidaya	AntaraneWS	19 Agustus 2025	KKP tegaskan komitmen implementasi dan perluasan manfaat ekonomi biru	https://www.antaraneWS.com/berita/5049617/kkp-tegaskan-komitmen-implementasi-dan-perluasan-manfaat-ekonomi-biru	Pewartanya: Arnidhya Nur Zhafira Editor: Kelik Dewanto	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen terkait implementasi strategis dan perluasan manfaat dari ekonomi biru pada paruh kedua 2025.

									Beberapa upaya strategis yang tengah didorong oleh KKP terkait pertumbuhan ekonomi biru di antaranya penangkapan ikan terukur yang penerapannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023. pemerintah mendorong pengembangan budi daya yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem, serta memberikan nilai tambah bagi nelayan.
7.	Perikanan Budidaya	Antaranews	19 Agustus 2025	KKP sebut penerbitan izin KJA di Pangandaran sudah sesuai aturan	https://www.antaranews.com/berita/5049305/kkp-sebut-penerbitan-izin-kja-di-pangandaran-sudah-sesuai-aturan	Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira Editor: Kelik Dewanto	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan penerbitan izin keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sudah sesuai aturan yang berlaku "Sudah ada pernyataan resmi dari KKP, bahwa dalam penerbitannya sudah sesuai aturan," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry KKP pada pekan lalu menyatakan ketiga perusahaan yang tengah dibicarakan telah mendapatkan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). kajian dari Universitas Padjadjaran (Unpad) juga menunjukkan bahwa kegiatan budi daya lobster menggunakan teknologi KJA telah berbasis riset.

VI. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN SEPTEMBER 2025

No.	Sub Sektor Pemberitaan	Media Sumber Pemberitaan	Tanggal Terbit	Judul Berita	URL	Penulis Berita	Kategori Isu	Tendensi Isu Pemberitaan	Uraian Singkat Pemberitaan
1.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	24 September 2025	Menteri Trenggono tekankan percepatan program strategis ekonomi biru	https://www.antaraneews.com/berita/5132376/menteri-trenggono-tekankan-percepatan-program-strategis-ekonomi-biru	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Abdul Hakim Muhiddin	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan adanya percepatan program strategis ekonomi biru melalui pengawasan ketat, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir berkelanjutan. "Tantangan sektor kelautan dan perikanan sangat dinamis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, implementasi ekonomi biru, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim,"
2.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	22 September 2025	KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak	https://www.antaraneews.com/berita/5126920/kkp-jaring-masukan-masyarakat-karawang-terdampak-revitalisasi-tambak	Pewarta: M.Ali Khumaini Editor: Risbiani Fardaniah	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjangkir saran dan masukan masyarakat di sekitar pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), dalam konsultasi publik terkait penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) revitalisasi tambak Pantura Jabar. Melalui konsultasi publik, pihaknya menggali informasi mengenai saran dan masukan dari masyarakat yang terdampak proyek revitalisasi tambak Pantura Jabar. Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat meliputi wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

3.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	22 September 2025	KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis	https://www.antaraneews.com/berita/5124532/kkp-gandeng-bpkp-perketat-pengawasan-implementasi-program-strategis	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Indriani	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat pengawasan implementasi program strategis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sektor kelautan serta perikanan nasional. "Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya BPKP," langkah itu ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dengan BPKP, yang salah satu agendanya membahas rencana kerja sama pengawasan antara Itjen KKP dengan BPKP.
4.	Perikanan	Antaraneews	17 September 2025	KKP siapkan regulasi permudah perizinan berusaha perikanan	https://www.antaraneews.com/berita/5116697/kkp-siapkan-regulasi-permudah-perizinan-berusaha-perikanan	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Zaenal Abidin	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan payung hukum mempermudah layanan perizinan berusaha perikanan terutama yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Tornanda Syaifullah di Jakarta, Rabu mengatakan regulasi tersebut berupa Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada

									Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	17 September 2025	Dongkrak ekonomi daerah, NTB kebut hilirisasi lima komoditas kelautan	https://www.antaraneews.com/berita/5116461/dongkrak-ekonomi-daerah-ntb-kebut-hilirisasi-lima-komoditas-kelautan	Pewarta: Sugiharto Purnama Editor: Kelik Dewanto	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat program hilirisasi untuk lima komoditas kelautan sebagai langkah strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Karim Marasabessy mengatakan kelima komoditas itu adalah garam, rumput laut, udang vaname, ikan tuna, dan ikan cakalang. Nusa Tenggara Barat sebagai daerah maritim dengan potensi luas laut mencapai 2,79 juta hektare yang terdiri atas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya, memberikan hasil yang optimal terhadap komoditas kelautan.
6.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	17 September 2025	KPI jaga lingkungan dengan lestarikan ikan belida di Palembang	https://www.antaraneews.com/berita/5115885/kpi-jaga-lingkungan-dengan-lestarikan-ikan-belida-di-palembang	Pewarta: Imamatul Silfia Editor: Biqwanto Situmorang	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kilang Pertamina Internasional (KPI) berupaya menjaga lingkungan dengan melestarikan ikan belida di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. "Populasi ikan belida semakin lama semakin menurun, ini yang membuat kami tergerak untuk ikut melakukan upaya pelestarian,"

									program ini turut melibatkan pemangku kepentingan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan (BRPPUPP), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), hingga Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang dan Yayasan Diversitas Lestari Nusantara.
7.	Perikanan Budidaya	Antaraneews	16 September 2025	KKP libatkan Kejagung awasi budi daya nila salin-pergaraman nasional	https://www.antaraneews.com/berita/5113717/kkp-libatkan-kejagung-awasi-budi-daya-nila-salin-pergaraman-nasional	Pewarta: Muhammad Harianto Editor: Biqwanto Situmorang	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi modeling budi daya ikan nila salin hingga pembangunan kawasan sentra industri garam nasional sehingga program yang menjadi mandat dari Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan baik. Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan pihaknya menggandeng Kejagung untuk mengawasi pelaksanaan tiga program strategis, guna memastikan implementasi berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi sektor kelautan dan perikanan nasional. Adapun tiga program strategis yang menjadi fokus pengawalan meliputi kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), serta

									Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).
8.	Perikanan	Antaraneews	15 September 2025	KKP tetapkan 65 lokasi awal pembangunan kampung nelayan merah putih	https://www.antaraneews.com/berita/5109841/kkp-tetapkan-65-lokasi-awal-pembangunan-kampung-nelayan-merah-putih	Pewartu: Shofi Ayudiana Editor: Kelik Dewanto	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan 65 lokasi untuk pembangunan kampung nelayan merah putih (KNMP) tahap pertama, yang menjadi langkah awal dari target 100 kampung nelayan yang akan dibangun tahun ini. Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda menjelaskan pembangunan tahap pertama sebanyak 65 lokasi sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025. Pembangunan 65 kampung yang siap dibangun pada tahap pertama memakan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Sebanyak 65 lokasi tersebut tersebar di desa dan kelurahan di berbagai provinsi yakni Aceh, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
9.	Perikanan	Antaraneews	11 September 2025	Indonesia unggul dalam potensi karbon biru, tetapi hadapi tantangan	https://www.antaraneews.com/berita/5102233/indonesia-unggul-dalam-potensi-karbon-biru-tetapi-hadapi-tantangan	Pewartu: Shofi Ayudiana Editor: Abdul Hakim Muhiddin	Positif	Positif, Berita yang memberikan citra baik, mendukung, atau mengapresiasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyimpan karbon biru, jauh melebihi ekosistem daratan. Ketua Tim Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor KKP

									Ade Wiguna, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, mengatakan ekosistem karbon biru, seperti hutan bakau (<i>magrove</i>) dan padang lamun (<i>seagrass</i>) di perairan Indonesia unggul dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO₂). Ketahanan penyimpanannya bisa berabad-abad hingga ribuan tahun di sedimen. Karbon biru adalah istilah untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem ini memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. CO₂ diserap oleh organisme laut dan disimpan dalam jangka panjang, baik di dalam biomassa maupun sedimen.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

VII. PENUTUP

A. Simpulan

1. Capaian adalah rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif total pemberitaan tentang perikanan budidaya;
2. Rasio jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya di media online, pada triwulan III tahun 2025 adalah 100% dimana semua pemberitaan terkait sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan bernilai tone positif.

B. Rekomendasi

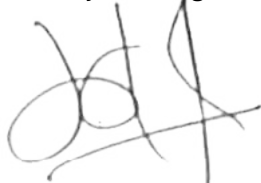
Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian presentase jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya triwulan III, telah diperoleh capaian maksimal, Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pemberitaan sebagai upaya peningkatan publikasi terkait program prioritas perikanan budidaya;
2. Meningkatkan frekuensi pemberitaan perikanan budidaya baik mencakup teknis maupun non teknis pada berbagai kanal media yang dimiliki sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (media) baik local maupun nasional guna membantu meningkatkan sebaran informasi sub sector perikanan budidaya.

Ambon, 7 Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen



Erdy Asmaul Basir, A.Md.,S.Pi

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi.,M.Pi